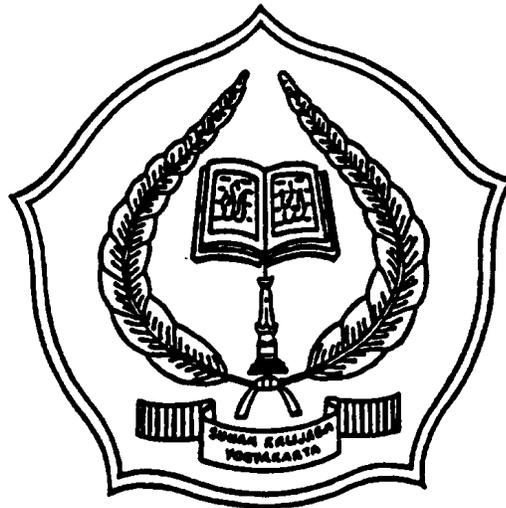


**KONTESTASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DAN MAJELIS
MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)**



Oleh
Hartono. S.H.I
NIM. 08 234 465

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartono. S.H.I
NIM : 08 234 465
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Maret 2010

Saya yang menyatakan,

Hartono. S.H.I
NIM : 08.234.465

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONTESTASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR
INDONESIA (HTI) DAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA (MMI)
Nama : Hartono. S.H.I
NIM : 08 234 465
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Ilmu Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam.

Yogyakarta, 1 Maret 2010
Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150178204

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : *KONTESTASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA
(HTI) DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)*

Nama : Hartono. S.H.I
NIM : 08 234 465
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Ilmu Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	:	()
Sekretaris	:	()
Pembimbing/Penguji	:	()
Penguji	:	()

diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu :
Hasil/Nilai :
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, penilaian, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Naskah Tesis berjudul :

***KONTESTASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DAN MAJELIS
MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)***

yang ditulis oleh,

Nama : Hartono. S.H.I
NIM : 08 234 465
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2010
Pembimbing,

Dr. Munawar Ahmad. M.Si.

ABSTRAK

Diskursus mengenai gerakan atau organisasi Islam politik dikalangan umat Islam, dari sekian banyak yang ada, salah satunya memiliki karakter atau kecenderungan yang kaku, eksklusif dan juga fundamentalis. Kecenderungan tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh bagaimana cara memahami pesan agama melalui teks namun mengabaikan kontekstualitasnya. Pesan serta keyakinan yang ingin menjaga keaslian, kemurnian dan kesucian dari teks, selalu menjadi cara berpikir bagi sebagian gerakan Islam politik yang ada, termasuk di dalamnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dengan narasi besarnya penerapan Syariat Islam. Syariat Islam yang idealnya dapat hidup dan mengilhami berbagai kemajuan cara berpikir dan bertindak seakan diingkari dengan sikap eksklusif, skriptual dan fundamentalis sehingga sistem demokrasi yang merupakan pilihan dari sekian pilihan tak luput pula dikritik sebagai paham *kufur* dan ketika menjalankannya menjadi *kafir*.

Gerakan Islam politik model HTI dan MMI yang bersifat kelompok memiliki relevansi untuk dikaji dengan menggunakan alat analisis teori identitas kolektif (*collective identity*), Selanjutnya jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dibantu dengan pendekatan sosio-historis untuk melihat, menemukan dan menggali ideologi, mekanisme dan arah perjuangan kedua gerakan Islam politik tersebut secara obyektif, selain itu sebagai bahan penunjang untuk memperkuat metode yang penulis bangun maka data yang bersumber dari hasil interviu, observasi dan dokumentasi sangat penulis butuhkan.

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa temuan untuk dapat melihat gerakan Islam politik model HTI dan MMI, gerakan Islam politik tersebut pada hakekatnya kelompok dijadikan sebagai basis perjuangan untuk menunjukan atau menonjolkan identitas kolektifnya, romantika sejarah, pemahaman terhadap Islam secara skriptualis serta moderanisme pemikiran dikesampingkan, maka gerakan Islam politik model ini dapat dinilai sebagai gerakan "*Un-Islamized for Islamic Movement*", awalnya dengan pendekatan *double movement* yang memiliki pendekatan antara idealitas-realitas akan berubah menjadi *multiple collective identity* bagi gerakan Islam politik model HTI dan MMI.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamza	`	apostrof
ي	h	y	Ye
	ya		

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
	ditulis	<i>`iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis	<i>Hikmah</i>
	ditulis	<i>`illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā`</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fit{ri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
—		ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
—		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + <i>yâ'</i> mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + <i>yâ'</i> mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + <i>waû</i> mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + <i>yâ'</i> mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>aū</i>
		ditulis	<i>qaūlun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur`ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā`</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Z awi al-furūd{</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penulis agendakan. Maka dari itu tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kecuali senantiasa memuji dan bersyukur kepada-Nya dalam setiap kesempatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. H. Abd Salam Arief. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam memulai dan menyelesaikan Tesis ini.
4. Dr. Munawar Ahmad. M.Si selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatan untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis yang sangat bermanfaat bagi penulisan tesis ini :

- ✓ Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, Ph.D (Sejarah Pemikiran Hukum Islam)
 - ✓ Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH (Alm), (Teori Konstitusi)
 - ✓ Prof. Dr. H. Musya Asya'ari (Islam dan Negara Bangsa)
 - ✓ Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D (Politik Islam Kawasan)
 - ✓ Prof. Dr. M. Abdul Karim, MA., MA (Sejarah Peradaban Islam)
 - ✓ Dr. Hamim Ilyas, M.A (Studi Qur'an-Hadis)
 - ✓ Dr. Yani Anshori (Islam dan Negara Bangsa)
 - ✓ Dr. Suharko/Nur Ichwan (Sosiologi Politik)
 - ✓ Dr. Siti Mutiah/Faturrahman (Ilmu Politik)
 - ✓ Dr. Siti Daulah (Metodologi Penelitian Ilmu Politik dan Pemerintahan)
 - ✓ Drs. Muchamad Shodik, M.Si (Penulisan Proposal)
 - ✓ Wawan Masudi, SIP, MLL (Ilmu Pemerintahan)
 - ✓ Nanang Nur Ichwan. SIP., MLL (Etika Politik dan Pemerintahan)
6. Ibunda dan ayahanda serta ibu mertua tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan terutama do'a beliau yang diucapkan dalam setiap helaan nafsnya yang tidak ternilai harganya demi kesuksesan anaknya dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.
 7. Istri tercinta, Yufi Musriyati, yang selalu menemani disetiap langkah penulis mulai kelokasi penelitian, perpustakaan, *brosing* data sampai menemani dalam penulisan mulai pagi hari sampai pagi hari selanjutnya, Dialah salah satunya orang yang selalu mengerti dan memahami serta memberikan dukungan yang luar biasa sehingga karya ini dapat terselesaikan tepat waktu.

8. Kakak, ponakan tersayang, yang tidak pernah jenuh dengan memberikan do'a dan motivasi sehingga terselesaikannya studi dan tesis ini.
9. Teman-teman angkatan tahun 2008 Program Pasca Sarjana UIN Suka, Mas Sandro (Blitar/085643040016), Mas Fadli (Padang/081328536392), Mas Robit (Jember), Mas Rizal (Pacitan/085228129306), Mas Agus (Kediri), Mbak Nunuk (Tuban/085737233939), Mbak Nikmah (Jambi/), Mbak Ama (Rembang/085643139122) dan Mbak Marni (TU HI) yang telah menjalin *ukhuwah* yang sangat bermakna, saling membantu dan member motifasi.
10. Dan terakhir temen-temen serta kolega yang tidak dapat penulis sebutkan.

Dengan segala hormat dan ucapan yang luar biasa penulis haturkan terima kasih atas segala bimbingan dan do'a yang penulis selama ini dapatkan, walaupun penulis sangat menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Akhirnya, mudah-mudahan penulisan tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan dapat menjadi sedikit sumbangsih keilmuan diantara sekian banyak ilmu Allah Subhanaullahi wata'ala.

Yogyakarta, 1 Maret 2010

Penulis,

Hartono. S.HI
NIM. 08 234 465

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Konseptual (Teoritik).....	14
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pengumpulan Data.....	20
a. Metode Interview.....	20
b. Metode Observasi.....	20
c. Metode Dokumentasi.....	21
2. Pendekatan Masalah.....	21
3. Analisis Data.....	22
a. Metode Heuristik.....	23
b. Metode Korelasi.....	23
c. Metode Kritik.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : DISKURSUS ISLAM DAN DEMOKRASI	26
A. Islam Dalam Diskursus Agama dan Politik-Kekuasaan.....	27
1. Islam Teologis.....	28
2. Islam Politik.....	30
a. Paradigma Islam <i>Kaffah</i>	32
b. Paradigma Islam; Agama <i>Oriented</i>	33
c. Islam Sumber Etika dan Moral.....	34

B. Hubungan Islam dan Demokrasi	37
1. Republik Islam Iran; Model <i>Teo-Demokrasi</i>	39
2. Dimensi Nilai Dan Prinsip; Relasi Islam dan Demokrasi	42
C. Sensor Muslim Terhadap Gerakan Islam dan Demokrasi.....	45
1. Mengidealkan Gerakan Islam yang Demokrastis	46
2. Kecenderungan Masyarakat Pada Sistem Demokrasi	47
3. Obsesi Masyarakat Kampus	52

BAB III : REAKTUALISASI PENERAPAN SYARIAH ISLAM DI

INDONESIA	61
A. Syariat Islam dalam Pandangan Ahli Fikih Indonesia	61
1. Pengertian Syariat Islam	66
a. Fikih; Apakah Sama dengan Syariat	72
b. Fikih; Apakah dapat Dinamakan Agama	75
2. Dasar Syariat Islam	80
3. Hukum Islam vs Hukum Positif	81
a. Hadirnya Perda-Perda Bernuansa Syariat Islam	86
b. Hukum Positif Bersifat Integral	95
B. Perkembangan dan Aktualisasi Ide Syariat Islam Di Indonesia .	97
1. Cita Ideal masuknya Islam di Nusantara	97
a. Teori Gujarat (Anak Benua India) <i>Symbolisme</i>	101
b. Teori Persia (<i>Pan-Islamisme</i>).....	101
c. Teori Arab (<i>Pan-Arabisme</i>)	101
2. Perjuangan Syariat Islam Pasca Kemerdekaan RI-ORBA ...	103
a. Sekilas DII/TII Tahu 1948-1949, SM Kartosuwiryo	110
b. Sejarah Berdirinya DII/TII	112
c. <i>Qanun Asasi</i> Negara Islam Indonesia	114
d. Tekanan Politik Orba	121
e. NII Baru Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ...	124
f. Eksistensi NII dan Korelasinya Dengan Gerakan Islam	128
3. Geliat Kebangkitan Gerakan Islam Politik Pasca Reformasi	131
a. Politik Islam Model Parlemeteri	135
b. Politik Islam Model Non-Parlemeteri	137

BAB IV : GENELOGI GERAKAN ISLAM MODEL HTI DAN MMI 140

A. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	143
1. Latar Belakang dan Ideologi Hizbut Tahrir	145
a. Tokoh Penting Dibalik Hizbut Tahrir	147
b. Ideologi Hizbut Tahrir	148
2. Paradigma Pemikiran Religia-Politik Hizbut Tahrir	155
a. Narasi Besar Syariat Islam sebagai Solusi	158

b. Menolak Paham Barat (Sekulerisme, Kapitalisme, Liberalisme dan Demokrasi)	160
3. Metode Dakwah dan Strategi <i>Jihad</i> Hizbut Tahrir	161
a. Metode Dakwah Hizbut Tahrir	162
b. <i>Jihad</i> Model Hizbut Tahrir	168
4. Target Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia	172
a. Membangkitkan Kembali Umat Islam	173
b. Penegasan Risalah Islam Sebagai Solusi (Bernegara) ...	174
B. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	178
1. Latar Belakang dan Ideologi Majelis Mujahidin	179
a. Visi-Misi Majelis Mujahidin	181
b. <i>Manhaj</i> Perjuangan Majelis Mujahidin	183
c. Sifat Gerakan MM.....	184
2. Paradigma Pemikiran Religia-Politik Majelis Mujahidin	189
a. Aqidah Sebagai Landasan Bertindak	198
b. Pedoman Mengamalkan Islam	192
c. Islam <i>Wajib</i> Diamalkan dalam Lembaga Negara	195
3. Metode Dakwah dan Strategi <i>Jihad</i> MM	199
a. Pendekatan Aliansi Sebagai Metode Perjuangan	201
b. <i>Jihad Fisabi Lillah</i> ; Strategi Perjuangan MM	202
c. Respon Majelis Mujahidin Terhadap Pelaksanaan <i>Jihad</i>	211
4. Target Gerakan Majelis Mujahidin di Indonesia	214
a. Penegakkan Syariat Islam Secara Formal	214
b. Kepemimpinan Nasional	217
BAB V : NALAR GERAKAN ISLAM POST-REFORMASI	224
A. Demokrasi Sebagai Sistem-Metode atau Patologi Politik	224
1. Solusi : Orentasi Baru Sistem Demokrasi	225
2. Membaca Sejarah Kegagalan Demokrasi Di Indonesia	229
B. Dialektika Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan	234
1. Paradigma Islam Fundamental (Formalis)	238
2. Paradigma Islam Liberal (Subtansialis)	249
3. Paradigma Islam Moderat (Integralis)	264
C. Mekanisme dan Relevansi Gerakan Islam Politik HTI dan MMI Dalam Konsep Penerapan Syariat Islam	275
1. Isu Penerapan Syariat Islam yang Massif	278
a. Negara Gagal Mewujudkan Cita Kemerdekaan	279
b. Negara Gagal Menjamin Keadilan	280
2. Resistensi Diskursus Terhadap Sistem Demokrasi	282
a. HTI : Konstitusinya Menggunakan Sistem Demokrasi ..	285

b. MMI : Organisasinya Mengadopsi Sistem Demokrasi ..	287
3. Perlawanan Terhadap Struktur Negara “Ideologi Pancasila”	291
a. Gerakan Islam Menjadi “Negara Bayangan”	292
b. Islamis atau Pancasila “Politik dua Kaki”	296
D. Un-Islamized For Islamic Movement	300
1. Gerak Ganda “ <i>Double Movement</i> ”	301
2. <i>Multiple Collective Identity</i>	303
BAB VI : PENUTUP	306
A. Kesimpulan	306
B. Saran-Saran	310
DAFTAR PUSTAKA	312
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	: (Produk Perda-perda yang memiliki nuansa Syariat Islam)	86
Tabel. 2	: (Gerakan atau organisasi non-politik)	106
Tabel. 3	: (Gerakan atau organisasi politik)	107
Tabel. 4	: (Rancangan Undang-undang HT dan persamaan dengan sistem demokrasi)	153
Tabel. 5	: (Beberapa buku resmi yang dijadikan rujukan oleh HT)	157
Tabel. 6	: (Dinamika kepengurusan AHWA)	187
Tabel. 7	: (Dinamika kepengurusan Lajnah Tanfidziyah MM)	188
Tabel. 8	: (MMI melihat pola gerakan Islam di Indonesia)	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	: (Survei, Angket di kampus UIN Yogyakarta)	55
Gambar. 2	: (Survei, Angket di kampus UIN Yogyakarta)	55
Gambar. 3	: (Survei, Angket di kampus UGM)	56
Gambar. 4	: (Survei, Angket di kampus UGM)	56
Gambar. 5	: (Survei, Angket di kampus UNY)	57
Gambar. 6	: (Survei, Angket di kampus UNY)	57
Gambar. 7	: (Survei, Angket di kampus UII)	58
Gambar. 8	: (Survei, Angket di kampus UII)	58
Gambar. 9	: (Survei, Angket di kampus APMD)	59
Gambar. 10	: (Survei, Angket di kampus APMD)	59
Gambar. 11	: (Naskah Proklamasi NII)	114
Gambar. 12	: (wawancara bersama Ismail Yusanto, Jubir HTI)	148
Gambar. 13	: (Suasana <i>halaqoh</i> pada akhir tahun)	161
Gambar. 14	: (Suasana penjualan buku HT)	161
Gambar. 15	: (foto suasana Kongres MM ke III, diambil dari website resmi MM)	181
Gambar. 16	: (foto; Ketua AHWA dan Lajnah Tanfidziyah)	183

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1	: LSI (Lembaga Survei Indonesia, 23September-3Oktober 2006)	47
Grafik. 2	: LSI (Lembaga Survei Indonesia, 23September-3Oktober 2006)	49
Grafik. 3	: LSI (Lembaga Survei Indonesia, 23September-3Oktober 2006)	50
Grafik. 4	: (Survei, dikampus UIN, UGM, UNY, UII dan APMD, tanggal 12 Desember 2009 -12 Januari 2010)	54
Grafik. 5	: (Gerakan Islam dalam priode sejarah)	171
Grafik. 6	: (Dukungan terhadap gerakan pro syariat Islam)	222

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar, dibesarkan sejak adanya nusantara yang pernah diproklmirkan oleh para pendahulu ketika itu pada masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit hingga masa kemerdekaan tahun 1945. Pengalaman sejarah ini tentu sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan negara saat ini untuk dijadikan sebuah cermin dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya untuk menuju Indonesia yang lebih maju, aman, berkeadilan, tentram dan sejahtera.

Untuk menuju itu semua dalam konstitusinya bangsa ini telah sepakat menjadikan negara ini sebagai negara hukum dengan ideologi¹ serta sistem demokrasi pancasilanya. Kedua aspek ini sangat berkaitan erat dimana hukum dijadikan panglima sedangkan demokrasi dijadikan sebuah sistem² yang dapat mengakomodir, memberi rasa kebebasan dalam berpikir, memberi hak-hak pada masyarakat yang minoritas (persamaan hak) atau dalam arti singkatnya demokrasi yang berupa suara/kedaulatan rakyat juga harus memiliki arti sebuah perjuangan haruslah bersandar pada perjuangan

¹ Suprpto, *Memerdekakan Indonesia Kembali Perjalanan dari Soekarno ke Megawati*, Prinsip ideologi Pancasila harus tetap diingat dan pertahankan karena. *Pertama*, Ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkemabang dari rakyatnya sendiri, *kedua* memiliki cita-cita yang menjangkau kedepan. *Ketiga*, memiliki daya untuk menyesuaikan dengan zaman (Jogjakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 141.

² Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*, Afan menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik dari demikrasi meliputi adanya; Akuntabilitas, Rotasi kekuasaan, Rekutmen politik yang terbuka, Pemilihan Umum, Menikmati hak-hak dasar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 5, th 2003), hlm. 7.

kerakyatan³ atau berpihak kepada kaum lemah dan tertindas⁴ bukan sebaliknya malah terjadi sebuah elitis-demoralisasi⁵.

Dengan kesepakatan (konstitusi) bahwa negara ini menggunakan sistem demokrasinya, tentu menjadi sebuah wadah atau bejana yang maha besar dimana didalamnya tumbuh, hidup dan berkembang berbagai entitas berupa golongan, pemikiran, gerakan, organisasi, LSM-LSM, sampai dengan yang berbentuk aliran. Kenyataan ini adalah buah karya dari adanya sistem demokrasi yang ada saat ini dimana kran yang dulunya ditutup rapat-rapat pada masa Orba saat ini dimasa yang sering disebut reformasi dibuka dengan lebarnya.

Dari konsekuensi logis diatas maka lahir dan berkembanglah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dimana keduanya merupakan hasil dalam bejana besar yang bernama sistem demokrasi yang memberikan kebebasan dalam berpikir dan berserikat. Dan kalau ditelaah secara mendalam semangat serta perjuangan kedua organisasi atau gerakan Islam ini setidaknya dalam kontek keindonesiaan sudah ada sejak awal negara ini merdeka, hal ini terlihat dalam perjalanan sejarah perdebatan

³ Hasyim Muzadi, dalam Pidato Politiknya “NU Masih di Tunggangi Kepentingan Partai Politik”, beliau menyatakan bahwa kehidupan politik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat, slogan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat itu sudah dilaksanakan namun kepemimpinan untuk rakyatlah yang belum sama sekali dilaksanakan (pemerintah) dan dirasakan (rakyat), dilain waktu beliauapun menegaskan bahwa demokrasi di indonesia saat ini ibarat demokrasi bagi sembako saja, karena para elit politik dan wakil rakyat hanya mementingkan diri dan golongannya saja tanpa pernah memikirkan masyarakat yang memilihnya. (Harlah NU ke 82 di Stadion Gelora Bung Karno, Jawapos 3 Februari 2008).

⁴ Gunawan, *Runtuhnya Konsolidasi Demokrasi* (Jogjakarta: Pusat Studi Masyarakat, Agustus 2002), hlm. 39.

⁵ Ahmad Syafi'i Maarif, “Masalah Dunia Islam dan Politik Global, Politik dengan Parameter Syar’i”, Disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah, 28 April 2007, di Hotel Garuda Yogyakarta.

negara Islam atau penerapan syariah Islam sebagai dasar negara di Indonesia selalu menarik. Negara Islam dengan cara mempraktekkan syariat Islam⁶ seolah menjadi primadona yang selalu ingin diperjuangkan untuk benar-benar terwujud oleh sebagian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia⁷ ini, baik itu pada awalnya melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan ataupun gerakan politik⁸ yang mengatasnamakan partai Islam, organisasi Islam, gerakan Islam dan masyarakat Islam.

Oleh karenanya dalam melihat perdebatan di atas maka asumsi yang terbangun khususnya pada awal kemerdekaan hingga hari ini masyarakat Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yakni kalangan nasionalis dan Islamis, dimana teori ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan pendekatan Individualis⁹ yang digagas William Liddle. Teori ini melihat serta memisahkan dua belah pihak yang seharusnya tidak terpisahkan dalam komposisi merumuskan dasar negara Indonesia.

⁶ Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 317.

⁷ Lihat, Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1998), dalam penelitian Azumardi Islam masuk ke nusantara setidaknya ada tiga perdebatan yang cukup serius yakni mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya dan waktu kedatangannya, dari ketiga teori tersebut penyusun melihat pada para pembawa Islam ke nusantaralah yang dititik beratkan, menurut Hikayat Raja-raja Pasai (ditulis 1350) *pertama*, pembawa Islam ke nusantara adalah seorang Syaikh Isma'il datang dari Makah lewat Malabar ke Pasai, *kedua* menurut Tarsilah Islam dibawa lewat Filipina pada abad ke 8/14 yang dibawa oleh seorang Arab bernama Syarif Awliya' Karim Al-Makhdum. Dari data ini penyusun melihat bahwa para pembawa ajaran Islam di nusantara ketika itu adalah murni untuk berdakwah dan tidak berkeinginan untuk mendirikan negara dengan berdasarkan syariat Islam, ini artinya dalam perspektif sejarah bangsa dan negara ini dalam arti sempit secara eksplisit tidak berkeinginan mendirikan atau mendasarkan pada agama tertentu dengan melihat berbagai dinamika, serta keadaan yang ada, hlm. 24.

⁸ Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 116.

⁹ R. William Liddle, *Revolusi Demokratisasi dari Luar* (Jakarta: Penerbit Nalar, 2005), hlm, 62.

Dalam pemahaman selanjutnya mengenai *adin wa daulah* (Islam adalah agama dan negara) atau ajaran Islam *Syumuliyah* (lengkap),¹⁰ pemahaman ini seolah sangat sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh dua Gerakan Islam yakni Hizbut Tahrir¹¹ Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin¹² Indonesia (MMI), dimana pemikiran politiknya kedua organisasi ini tetap menegaskan bahwa dasar negara haruslah syariat Islam jika tidak maka itu adalah kafir.¹³ Pernyataan tegas ini seolah menjadi cambuk serta memobilisasi massa atas nama agama yang dibawa keranah politik, pun demikian ternyata sikap politik seperti ini pada kenyataannya masih terus diperdebatkan dalam ranah pemikiran dan prakteknya, oleh karena itu kalau dilihat secara seksama politik umat Islam di Indonesia setidaknya terbelah menjadi dua bagian¹⁴ keduanya dalam bahasa Bahtiar Effendy disebut sebagai politik non-integratif

¹⁰ Antony Balack, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 573.

¹¹ Hizbut Tahrir, berdiri tahun 1953. Dari bagian barat, ruangan Masjidil Aqsa, 56 tahun silam, jalan baru itu dirintis oleh seorang pemikir, politikus ulung Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. *Republika*, 13/04/09)

¹² Majelis Mujahidin Indonesia adalah lembaga yang dilahirkan melalui Konggres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. Konggres tersebut bertemakan Penegakan Syari'at Islam, dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 Propinsi di Indonesia, dan beberapa utusan luar-negeri. Konggres Mujahidin I itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi* (AHWA) untuk meneruskan misi Penegakan Syari'at Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin. <http://google.co.id/majelismujahidin/com>.

¹³ Sa'duddin As-Sayyid Shalih, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, terj. Muhammad Thaib (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), dalam pemikiran Hasan al-Banna & Ikhwanul Muslimin, awal kemunculannya adalah untuk merespon dan membangkitkan kembali masa-masa kejayaan Islam sebelumnya yakni dengan dua jalan yang ditempuhnya. *Pertama*, mengajak pada masyarakat untuk menolak undang-undang buatan manusia (hukum negara sekuler) dan menggantikannya dengan berbasis syariat Islam. *Kedua*, mengajak membebaskan dunia Islam dari cengkraman penjajah asing. hlm. 170.

¹⁴ Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 67.

dan politik parlementeri,¹⁵ ataupun tiga bagian untuk benar-benar berkeinginan mendirikan negara atas dasar syariat Islam, bagian itu. *Pertama*, kalangan Islamis yang berjuang ke arah negara Islam Indonesia dengan jalan dialog di parlemen¹⁶, *Kedua*, kalangan Islamis yang memperjuangkan Islam ke arah negara Islam¹⁷ di Indonesia melalui jalan agitasi (membenarkan segala cara)¹⁸ dan konfrontasi,¹⁹ yang dalam terminologi pemikir Barat kemudian sering disebut sebagai kalangan fundamentalisme^{20, 21} yang akhirnya

¹⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, Oktober 1998), hlm. 205-206

¹⁶ *HTI-Press*, Jubir HTI: wacana penting untuk perubahan dan tegaknya khilafah, penegakan syariat Islam/khilafah sebenarnya bukan dari parlemen karena kalau dilihat hingga dulu sampai saat ini bahkan banyak pula partai politik Islam di parlemen, pada kenyataannya syariat Islam belum bisa tegak jadi menurut HTI hanya kesadaranlah yang bisa menegakkan itu semua dan HTI bergerak pada level tersebut selain itu dari kesadaran itulah maka kita akan memiliki kekuatan karena kekuatan itu berasal dari umat yang sadar. Dari sanalah, sebenarnya perubahan itu bakal terjadi. Memang jauh dari pemahaman kebanyakan orang yang menganggap perubahan itu selalu menggunakan rute yang 'lazim' melalui pemilu masuk parlemen untuk merubah undang-undang, di eksekutif memimpin. Walaupun secara praktis faktanya tidak pernah melahirkan suatu perubahan yang mendasar. <http://goggle.co.id/hti> akses 8 April 2009.

¹⁷ Ishomuddin, *Diskursus Politik dan Pengembangan; Melacak Arkeologi dan Kontroversi Pemikiran Politik dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2001), Ali Abd. al Raziq dalam bukunya *Fundamentals of Government* yang diterjemahkan dari karyanya (*al-Islam wa ushul al-Hukm*), ia berpendapat bahwa Islam tidak pernah mengklaim suatu bentuk pemerintahan dan negara duniawi akan tetapi hal ini diserahkan untuk difikirkan secara bebas oleh pemeluk-pemeluknya. hlm. 86

¹⁸ Tariq Ali, *Benturan antar Fundamentalisme; Jihad Melawan Imprealisme Amerika*, dalam buku ini (Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil; New York: Harpersanfrancisco, 2002*) ia mengemukakan ada lima sebab yang bisa mengubah agama menjadi bencana (1). Klaim kebenaran mutlak (*absolute truth claims*), (2). Ketundukan buta/taklid (*blind obedience*), (3). Ingin mengembalikan masa keemasan Islam (*establishing the "ideal time"*), (4). Membenarkan segala cara (*the end justifies any means*), (5). Menyatakan perang suci (*declaring holy war*), terj. Hodari Arieiv (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. ix-x

¹⁹ Abdurahman Wahid, "Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama". Dalam konteks kebebasan agama di sini sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap berbagai kekerasan yang menamakan dirinya sebagai Front Pembela Islam, dan organisasi Islam yang lainnya, karena menurut beliau kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia ini setiap penduduknya haruslah dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah pun jangan condong ke salah satu agama yang ada, banyak kejadian anarkis, pengerusakan bahkan sampai pembantaian dengan mengatasnamakan agama tertentu yang semua itu belum tentu pula kebenarannya. Hendaknya agama sepetutnya menjadi persoalan personal, bukan pemerintah membawanya ke ranah agama sebagai simbolisasi dalam pemerintahan khususnya (Islam) jika ini terjadi sama halnya kita merendahkan kedudukan agama itu sendiri. (*Jawapos*, Minggu 23 Desember 2007).

²⁰ Mahatir Muhammad, *Menjadi Muslim Fundamentalisme*, tulisan ini disarikan oleh Teguh Santoso, wartawan Rakyat Merdeka dalam pembukaan "Seminar Tajdid Islam" yang

dikonstruksi dengan label terorisme²² tanpa melihat bagaimana aspek sosial-keagamaannya dan pelacakan sumber ideologis. *Ketiga* lewat jalan kultural.²³

Dalam waktu dan titik tertentu sekiranya dapatlah dilihat kedua Gerakan Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) seolah saling berkompetisi (walaupun tak terlihat secara nyata) dan menegaskan untuk sebisa mungkin dalam perjuangannya agar sebuah negara (Indonesia) harus berdasarkan syariat Islam,²⁴ karena dalam pandangannya hanya syariat Islam yang dituntun oleh wahyu Allah SWT yang bisa mensejahterakan dan memberikan sebuah keadilan bagi seluruh umat manusia dan sekaligus sebagai ideologi alternatif/antitesa terhadap sistem

digelar oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (Yadim) dan Center for Moderate Moslem (CMM) Indonesia di Kuala Lumpur, April 2006. Mahatir berkata “saya adalah seorang Muslim Fundamentalis yang berarti berpegang teguh pada asas Islam yakni Al-Quran dan hadist yang sahih, bukan fundamentalis seperti yang diartikan oleh Barat dengan Muslim yang keras, ekstrim serta teroris”. dalam Bunga Rampai *Islam Mazhab Tengah*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), Editor Hery Sucipto hlm381

²¹ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Masih dalam kaitannya kata fundamentalisme ternyata para ulama Mazhab besar di dunia ini seperti Syi’ah, Sunni dan Ahmadiyah sepakat dengan penggunaan kata fundamentalisme sebagai dasar dalam beragama untuk meyakini ajarannya, pun demikian ternyata dalam tradisi Kristen kata fundamentalisme juga digunakan untuk meyakini lima butir fundamentalisme yang disebut “*supernaturalisme konservatif*” yaitu *Pertama*, kebenaran mutlak dan tiadanya kesalahan pada Kitab Suci Injil (*Holy Bible*). *Kedua*, kelahiran Jesus dari Ibu maria yang suci (perawan). *Ketiga*, penebusan dosa umat manusia oleh Jesus. *Keempat*, kebangkitan kembali Jesus secara jasmaniyah yang turun ke bumi. Dan *Kelima*, ketuhanan Jesus Kristus. hlm. 11-12

²² Nur Khalik Ridwan, *Santri Baru; Pemetaan Wacana Ideologi dan Kritik* (Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004), hlm. 79.

²³ Ahmad Safi’i Ma’arif, “wawancara di kampus UGM”, Jum’at 14 Maret 2008.

²⁴ <http://www.google.co.id/mmi/islamika>. Dalam profil Majelis Mujahidin Indonesia, Maksud dan Tujuan Majelis Mujahidin bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (mujahidin). Tujuannya adalah, untuk bersama-sama berjuang menegakkan Syari’ah Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga Syari’ah Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Pengertian Syari’at Islam disini adalah, segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Akses Minggu, 26 April 2009.

demokrasi yang dianggap sudah gagal dan tidak mampu mensejahterakan masyarakat.²⁵

Dari fakta adanya sistem demokrasi yang ada seperti yang penyusun uraikan di atas dengan antitesa yang disampaikan oleh HTI dan MMI, Tesis ini ingin menggali secara mendalam dan komprehensif karakter gerakan Islam bermain dalam bejana demokrasi, dilihat dari sejarahnya, dinamika, dan perkembangan hingga persaingannya antar internal gerakan Islam. dengan tujuan mendapatkan informasi baru serta perspektif baru dalam kajian ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, penelitian ini difokuskan dalam tiga topik permasalahan, yang menjadi problem akademik, sebagai berikut :

1. Landasan ideologi seperti apa yang dibangun Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia.
2. Mekanisme atau metode apa yang dibangun oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia, dalam penegakan syariat Islam di Indonesia.
3. Sejauh mana tujuan yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dalam gerakan penegakan syariat Islam di Indonesia.

²⁵ *Lihat*, Sabili. Baru-baru ini AM. Hendropriyono menyatakan, “Setelah tesis Liberalisme-Kapitalisme gagal mensejahterakan dunia, Kekhilafahan seharusnya muncul sebagai penggantinya. Karenanya, Islam perlu menjawab tantangan globalisasi dengan membangun Khilafah Universal. Hanya sistem inilah yang bisa mengatur dan mensejahterakan dunia, karena tatanan Sekular-Kapitalisme telah gagal.” (Sabili, no 19 TH XVI, 9 April 2009, hlm. 28).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Konsekuensi logis karya ilmiah dari sebuah produk keilmuan adalah terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis, baik untuk menyangkal atau menguatkannya, ilmu akan berkembang dengan pesatnya apabila ada sebuah dialog dan saling menyangkal dalam pengertian bukan saling menafikan tetapi saling membenarkan dan memajukan.²⁶ Keadaan suasana keilmuan seperti inilah yang seharusnya dibangun karena sudah menjadi hukum alam yakni ketika keilmuan sudah mapan pada tahap tertentu akan mengalami sebuah anomali pula, dengan lahirnya berbagai pembaharuan.²⁷ Demikian juga, ternyata sebuah metamorfosis keilmuan pada titik tertentu akan mengalami pula sebuah titik jenuh untuk kembali pada kosnep awal.

1. Tujuan Penelitian

Kenyataan yang terlihat dengan hadirnya HTI dan MMI saat ini, dalam perspektif positifistik akademik murni keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan syariat Islam sebagai dasar negara, namun dalam prakteknya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Inilah salah satunya yang ingin penulis angkat untuk melihat secara seksama bagaimana sebenarnya HTI dan MMI ini untuk benar-benar menegakkan syariat Islam serta sejauh mana pula persaingan yang terjadi di dalamnya.

²⁶ Frans Magnis Suseno, *Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 20.

²⁷ M. Tamtowi, *Dinamika Hukum Islam; Studi Konsep Umurun Mutasyabihat*, abstraksi disertasi yang diajukan kepada Program Paskasarjana Strata Tiga dalam bidang Ilmu Agama Islam pada UIN Sunan Kalijaga, pada Jumat 5 Januari 2009, di gedung serba guna UIN. hlm. 6.

Selanjutnya sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui konsep-konsep dasar yang berbentuk ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mekanisme atau metode apa yang dibangun oleh HTI dan MMI untuk mewujudkan penegakan syariat Islam di Indonesia yang notabnya memiliki pluralitas yang tinggi dan sistem demokrasi yang telah disepakati.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan sejauh mana tujuan yang ingin dicapai Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia, sehingga gerakan ini bisa tetap eksis dan mendapat tempat di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan penelaahan secara akademis kepada masyarakat berkenaan dengan Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dilihat dari ideologi yang digunakannya.
- b. Memberikan perspektif akademis dengan cara melihat bagaimana metode yang digunakan serta dibangunnya untuk bisa menegakkan syariat Islam.
- c. Sebagai evaluasi untuk menilai, mengukur dan menelaah seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis

Mujahidin Indonesia yang mengatas namakan dirinya penegak syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam buku *Politik Syariat Islam*, karya Taufik Adnan Amal Panggabean, setidaknya hanya memaparkan dan mengidentifikasi beberapa gerakan atau organisasi keagamaan yang konsen terhadap isu-isu penegakan syariat Islam dari awal kemerdekaan hingga hari ini, yakni adalah; *Darul Islam* (SM. Kartosuwiryo NII), *Komando Jihad* (Warman-Dewan Revolusi Islam Indonesia 70-80), *Jamaah Imran* (pecahan Komando Jihad Warman). Ketiganya digolongkan dalam kategori sebagai “Pembentukan Negara Islam dan Penerapan Syariat Islam”. Sedangkan *Laskar Jihad-Jafar Umar Thalib* cenderung salafisme serta gerakan untuk merespon konflik saudara antara Kristen dan Islam. *FPI-Habib M. Riziq Syihab* (alat perwira dan berubah pada isu penegakan syariat Islam). *MMI* Organisasi Kemasyarakatan Islam konsen pada penegakan syariat Islam, Imamah dan Jihad. Kemudian ketiganya dikelompokkan pada ”Organisasi Islam Radikal-Penegakan Syariat Islam”. Dan ada beberapa daerah yang berkeinginan menerapkan syariat Islam yakni Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu dan Pamekasan.²⁸

Sedangkan thesis yang di sampaikan Sarifudin Jurdi tentang isu-isu aktual yang disuarakan oleh gerakan-gerakan baru Islam yang muncul setelah tumbanganya Orde Baru, seperti HTI, Front Pembela Islam (FPI), MMI, PKS

²⁸ Taufik Adnan Amal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2004), hlm. 65-82.

(yang menyatakan dakwah PKS tidaklah jauh dengan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin),²⁹ Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), maupun Laskar Jihad (LJ), menjadi sangat menarik dengan isu sentral khilafah mengingat kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ikut menyuarakan pentingnya dibangun *khilafah Islamiyah*.

Dalam tulisan lain yang disampaikan oleh Himayatul Ittihadiyah, pada Jurnal Penelitian Agama; *Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Histrografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI)*, dalam uraian ini penulis melihat bahwa Ulama HTI dan MMI hanya dapat menerima identitas Islam yang menunjukkan ciri khas yang dapat dilihat secara visual sebagai tanda pengenalan diri seperti halnya bentuk bangunan, model pakaian dan wujud fisik lainnya atau dalam terminologi lain disebut pendekatan Islam formalisme.³⁰ Sedangkan diluar itu semua seperti Islam moderat ditolak, akan tetapi berbeda dengan cara pandang NU dan Muhammadiyah yang melihat Islam secara konferhensif alias tidak mempersoalkan berbagai indentitas yang ada dalam Islam.

M. Amien Rais dalam tulisannya yang berjudul ”Tidak ada Negara Islam”, yang ada dalam buku *Tidak ada Negara Islam Surat-Surat Politik*

²⁹ Sri Wahyuni dan Udio Basuki, *Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pasca Orde Baru* (Studi terhadap pemikiran Politik Partai-partai Islam), SOSIO-RELEGIA; Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol.3, No. 3, Mei 2004, hlm. 357.

³⁰ Himayatul Ittihadiyah, *Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Histrografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI)*, Jurnal Penelitian Agama; Media Komunikasi, penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama, ISSN: 0854-2732. Vol. XVII, No. 3 September-Desember 2008, hlm. 586.

Nurcholish Madjid-Mohamad Roem, ia menegaskan *Islamic State* atau negara Islam tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah, apalagi penegakan syariat Islam dalam konteks negara Indonesia saat ini.³¹ Pendapat ini dipahami oleh Amien karena bagi dia, *etos Islam*, menegakan keadilan, serta menciptakan masyarakat yang *egalitarian* itulah yang lebih penting dibanding menegakan syariat Islam dalam formalitas kosong.

Masykuri Abdillah, dalam bukunya *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*.³² Masykuri menilai sebenarnya bukan berarti bahwa hukum atau syariat Islam tidak di formalisasikan sama sekali dinegeri ini karena pada kenyataannya syariat Islam sudah diformalisasikan dalam bentuk hukum (perkawinan, hukum haji, hukum zakat dan hukum perbangkan Islam).

Martin van Bruinessen, dalam bukunya *Rakyat Kecil, Islam Dan Politik*.³³ Dalam pendekatan sosiologinya ia mengidentifikasi bahwa di dunia Kristen maupun Islam sebagian besar memaknai gerakan fundamentalisme sebagai gerakan yang anti terhadap modernitas, asumsi ini artinya Martin sama halnya menggolongkan gerakan Islam yang ada adalah anti terhadap sistem demokrasi.

Sedangkan Irfan S. Awwas dalam bukunya *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan*

³¹ M. Amien Rais dalam tulisannya yang berjudul *Tidak ada Negara Islam*, yang ada dalam buku *Tidak ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Majdjid-Mohamad Roem* (Jakarta: Djambatan, 1997,). hlm.XXII

³² Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, Juni 2005, hlm. 1 & 7.

³³ Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam Dan Politik* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, April 1999), hlm. 209.

Kaum Nasionalis-Sekuler.³⁴ Ia sebenarnya banyak berbicara dalam sisi historis dimana negara Islam dahulu pernah ada dan mengalami sebuah penghianatan yang luar biasa, namun dalam buku tersebut ia juga memaparkan sebuah pemaknaan serta pelaksanaan jihad kaum mujahidin yang luar biasa tangguhnyanya, dengan cara berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk berjihad secara ikhlas demi terwujudnya masyarakat yang Islami, damai, dan berkeadilan.

Taqiudin An-Nabhani, dalam karyanya *Peraturan Hidup dalam Islam*, ia menegaskan kepatuhannya pada seorang pemimpin atau *Amirul Mukminin* dalam meletakkan hukum syaria dengan argumen "Perintah Imam wajib dilaksanakan baik secara lahir maupun batin", dan bagi *Amirul Mukminin* ini memiliki kewenangan berjihad untuk menentukan hukum sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapinya, artinya secara metode memiliki signifikansi sosiologi hukum kedepan akan, tetapi pendekatan yang digunakan masih terasa normatif yaitu syariat Islam masih dipahami kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah apa adanya³⁵ tanpa berani berjihad bahwasanya ada *living* Al-Quran dan Sunnah.

Dari sekian tulisan yang ada, sebagian besar masih terkotak dalam dua sudut pandang, yakni Islam substantif (modernitas, demokrasi) dan Islam formalistik (normatif, fundamentalis), kalau dipetakan seperti Taufik Adnan Amal ia lebih berbicara dalam wilayah kajian historis gerakan Islam, S. Jurdi

³⁴ Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis-Sekuler* (Jogjakarta: Uswah, 2008), hlm. 272.

³⁵ Taqiudin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Jakarta: HTI-Press, Maret 2007), hlm. 127-128.

berbicara pada wilayah ideologi gerakan Islam, Himayatul I, berbicara pada wilayah histrografi atau politik identitas, Amin Rais dan Masykuri A. Dan Martin van Bruinessen berbicara lebih banyak gerakan Islam dalam kontek demokrasi dan hanya Irfan S. Awwas yang berbicara pada wilayah penegakan Syariat Islam dengan jalan jihadnya dan Taqiuddin An-Nabhani dengan Khilafah Islamiyahnya masih cenderung kembali pada romantisme kejayaan Islam masa lalu, sedangkan dalam kontek lokalitas masih belum menemukan bagaimana mewujudkan syariat Islam.

Dari kajian pustaka di atas sekiranya belum diketemukan sebuah pendekatan interdisipliner yang dapat menaungi berbagai paham, gerakan yang bersifat universal, maka dari itu pemaknaan serta pendekatan agama-psikologis-demokratis diharapkan bisa menjadi sebuah alternatif untuk dapat melihat sejauh mana ideologi, *jihad-militansi* yang dimiliki oleh para gerakan Islam untuk tetap memperjuangkan penegakan syariat Islam, apakah dilandaskan pada ajaran yang bersifat tiologis-normativ-suci atau semua ini sebuah kepeintinagn politik terselubung, atau ada faktor lain yakni semua itu dibangun sebagai alat untuk penyeimbang dalam kancah politik regional maupun global.

E. Kerangka Konseptual (Teoritik)

Dalam bentuk wacana dan aksi isu penerapan atau penegakkan syariat Islam di Indonesia terus bergulir dan tiada hentinya,³⁶ ada yang pro dan ada pula yang kontra, dalam wacana tersebut setidaknya memiliki sebab atau

³⁶ Haedar Nashir dan Pramono U Tanthowi, "Gerakan Formalisasi Syariat Tak Ada Matinya" IslamLib.com, Senin, 16 Juli 2007. Akses pada 18 November 2009.

keterpengaruhannya sejarah dimana gerakan seperti ini pernah dibungkam dan dibisukan oleh kekuasaan politik.

Dalam kaitannya untuk memahami dua gerakan besar dalam Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang konsen pada isu penerapan atau penegakkan syariat Islam, penelitian ini setidaknya akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai teori untuk menggali berbagai dinamika yang terdapat di dalamnya, seperti yang diungkapkan oleh A. Syafii Maarif dalam tulisannya “Masa depan Islam di Indonesia” sensus penduduk Indonesia tahun 2000 mencatat bahwa pemeluk Islam mencapai 88,22 %, menurut Syafii dari fakta ini tentu umat lain tidaklah harus risau karena ada dua organisasi besar” yang terus berjuang menjadikan Islam sebagai agama yang ramah terhadap siapapun, bukan malah sebaliknya Islam menjadi hakim dan monolitik dalam penafsiran agamanya sehingga terjadi sebuah pengklaiman kebenaran yang disebabkan hanya perbedaan penafsiran dalam agama atau ideologi.³⁷ Pertanyaannya kemudian, bukankah keragaman untuk bisa saling memahami³⁸ dan perbedaan yang ada bukankah merupakan karya Tuhan?³⁹

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Bhenika Tunggal Ika, The Wahid Institut dan Ma'arif Institut, April 2009), hlm. 7

³⁸ Lihat, M. Attamimy Habib Husen al-Habsyi dan Peranannya dalam Perkembangan Syi'ah di Bangil, Ringkasan disertasi yang diajukan pada Program Paskasarjana UIN Sunan Kalijaga, pada Senin, 13 April 2009. dalam banyak pemikiran menyebutkan setidaknya pemahaman golongan Islam yakni Sunni dan Syi'ah selamanya tidak akan pernah bertemu atau berdamai, namun sangat berbeda dalam isi disertasi disebutkan bahwa Habib Husen al-Habsyi yang notabennya orang Sunni akan tetapi ia bisa menyatukan dengan pemikiran Syi'ah dengan cara saling memahami.

³⁹ Andy Darmawan, *Bedah Buku Multikulturalisme*, di UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Jum'at, 3 April 2009. dua konsep besar dalam kehidupan manusia yakni keragaman adalah karya Tuhan dan konflik adalah hasil gerak perubahan manusia, harus dipahami dengan

Hadirnya HTI, MMI, NU dan Muhammadiyah serta gerakan Islam yang lainnya merupakan manifestasi sebuah gerakan sosial, khususnya bagi HTI dan MMI dimana pada awalnya mereka melihat ada sebuah situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol⁴⁰ yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis (walaupun tidak diakui keberadaannya”) masyarakat memiliki andil dan ruang untuk bisa memperbaiki sistem atau tatanan masyarakat yang tidak normal.

Untuk merespon semua itu pendekatan gerakan sosial dapat dijadikan sebuah panduan untuk melihat dinamika selanjutnya yang terjadi dalam tubuh HTI dan MMI hingga sampai dengan isu penerapan syariat Islam. Pendekatan gerakan sosial ini setidaknya terbagi dalam dua kategori yaitu gerakan sosial kelas⁴¹ dan gerakan sosial kelompok etnis. Akan tetapi pendekatan tersebut belumlah cukup untuk melihat berbagai aktifitas gerakan Islam secara komprehensif karena pendekatan tersebut hanya menjelaskan sebuah proses yang sifatnya *natural* dari gesekan-gesekan sosial yang ada.

Pada tahap selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki insting untuk berkelompok atau dalam sosiologi, disebut *segregasi*

semangat humanisme yang tinggi, karena perbedaan bukanlah sebuah perpecahan namun perbedaan adalah *suantullah*.

⁴⁰ <http://google.co.id/teorigerakansosial>, diakses pada hari selasa 10 Nov 2009, pukul 10.00

⁴¹ Gerakan sosial kelas, sering diletakkan ilmuwan yakni terjadi akibat adanya sebuah gesekan yang cukup signifikan antara kelas atas dan kelas bawah, akan tetapi dalam kasus ini penulis menempatkan gerakan HTI dan MMI sebagai pemersatu yang merespon gerakan kelas sosial, dan pendekatan ini di gunakan dalam tahap melihat kekangan serta pembisuan hak politik yang dilakukan oleh penguasa terhadap berbagai perserikatan dan ide-ide pemikiran yang dianggap minoritas akan tetapi berada serta tumbuh di lingkungan masyarakat yang mayoritas.

sosial. Manusia cenderung mengelompokkan diri dengan individu lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Dan hal ini juga yang sedikit banyak menjelaskan, kenapa beberapa orang dapat berkumpul dan membentuk sekumpulan sahabat yang akrab, atau beberapa orang berkumpul membentuk perkumpulan dalam gerakan dan ideologi tertentu, karena semua itu terbangun atas dasar membentuk suatu identitas kolektif, suatu identitas yang kalau dapat dibilang demikian mewakili individu-individu di dalamnya secara umum. Dan biasanya, individu tersebut bangga dengan identitas kolektif tersebut, bahkan dalam beberapa kasus, individu yang ada akan merasa bangga memamerkan identitas kolektif yang ada.

Dari penjelasan diatas betapa penting penjelasan teori identitas kolektif dijadikan sebuah alat atau pisau analisis untuk dapat membedah gerakan Islam⁴² yakni HTI dan MMI secara komprehensif. Pemaknaan sederhana “Identitas” adalah cara untuk menjaga karakter,⁴³ sifat beda, strata sosial, agama, ras/etnis, bendera kelompok, organisasi atau gerakan⁴⁴ yang pada umumnya menjadi referensi penting dalam eksistensi identitas kolektif.

Pada tahap berikutnya perilaku identitas kolektif bukan merupakan tindakan manusia yang tidak terarah akan tetapi ada kesadaran atas norma, ideologi kolektif, pemahaman yang diyakini dan merespon segala isu yang

⁴² Moeslim Abdurrahman, *Islam dan Politik Identitas*, Moeslim menganalisa dalam politik identitas setidaknya Islam yang notabennya sebagai agama bisa dijadikan sebuah identitas kolektif dalam sebuah aliran politik, namun pemikiran seperti ini belum memiliki signifikansi yang memadai di negeri ini, akan tetapi masih cenderung termanifestasi dalam ideologi dalam sebuah politik. *Kolom*, Edisi 49/02 - 07/Februari/1998

⁴³ Fromm, Teori Identitas Sosial, <http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/> - _ftn5, diakses 11 November 2009.

⁴⁴ Quintan Wiktorowicz, *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach* (Indiana University Press, 2004), hlm. 22.

sifatnya mengancam eksistensi identitas kolektif yang mereka bangun. Oleh karena itu teori identitas kolektif berasumsi bahwa konflik dapat terjadi disebabkan oleh identitas yang terancam sehingga dalam gerakan-gerakan tertentu terkadang dapat saja menghalalkan sebuah pendekatan yang sifatnya ekstrim/keras seperti jihad *fisabilillah* yang sesungguhnya yakni terjun langsung secara lahir maupun batin untuk memerangi atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya.⁴⁵

Dari asumsi yang telah dibangun akhirnya dapat dipahami bahwa teori identitas kolektif yang melekat pada seseorang atau kelompok merupakan identitas menonjol yang ingin dipertahankan. Oleh karena itu, individu yang memiliki identitas kolektif menonjol, maka baik wacana maupun tindakannya akan sejalan dengan norma kelompoknya. Namun, jika memang individu tersebut diidentifikasi dalam suatu kelompok, maka wacana dan tindakannya harus sesuai dengan wacana dan tindakan kelompoknya.

Akhirnya dapat dipahami bahwa identitas kolektif (sebagai teori) yang dikembangkan oleh ulama HTI dan MMI yang hanya dapat menerima identitas Islam⁴⁶ dan sekaligus menunjukkan ciri khas yang dapat dilihat secara visual sebagai tanda pengenalan diri seperti halnya bentuk bangunan, model

⁴⁵ *Ibid*, Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan ...* hlm. 272.

⁴⁶ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa; Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Yudi Latif melihat *Identitas Kolektif* lahir dari sebuah benturan serta wacana-wacana yang terus terbangun, seperti halnya SI (Serikat Islam) yang dijadikan sebuah identitas kolektif yang bersumber dari sebuah ideologi yakni Islam, ini artinya jika di bandingkan dengan HTI dan MMI memiliki kesamaan sumber ideologi untuk membangun sebuah identitas kolektif, selain itu rasa merasakan kesamaan dalam berjuang-jihad, identitas tertentu dan lain sebagainya menjadi basis yang utama (Bandung: PT. Mizan Pustaka, September 2005), hlm. 297-301.

pakaian dan wujud fisik lainnya atau dalam terminologi lain disebut pendekatan Islam formalisme. Artinya bagi HTI dan MMI identitas sangatlah penting untuk bisa menunjukkan sebuah eksistensi sebuah gerakan yang tidak sama dengan gerakan yang ada lainnya, selain itu identitas yang ditunjukkan disini adalah sebuah pemaknaan dari pemahaman ideologi yang dimilikinya dengan pendekatan normativitas.

F. Metode Penelitian

Saat ini ide penegakan syariat Islam begitung buming dan terus diperjuangkan oleh HTI dan MMI dengan tidak melepaskan aspek kesejarahan pertama kali negeri ini didirikan, hal ini sangat penting karena akar dari evoria yang ada saat ini tentunya tidak akan bisa terlepas dengan sejarah masa lalu.

Dari adanya varian pemikiran seperti di atas inilah akhirnya dapat sedikit diambil sebuah benang merah untuk bisa memahami HTI dan MMI dengan pendekatan kesejarahaan (*longitudinal*)⁴⁷ dan dibantu dengan metode sosiologi sebab untuk memahami keduanya perlu adanya sebuah penelusuran secara objektif terhadap identitas HTI dan MMI.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data-data yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah data yang dimulai dari lapangan sebagai dasar dan diperoleh secara *grounded*, dimana didalamnya ada aspek-aspek fenomenologis, interaksi simbolis, kebudayaan dan antropologis.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hlm. 7.

Namun data-data di atas masih pula membutuhkan data yang bersumber dari data lain yang sifatnya induktif.⁴⁸

1. Pengumpulan Data

Melihat kajian atau penyusunan tesis ini adalah kajian penelitian maka sumber datanya adalah karya-karya yang bersumber dari kedua lembaga tersebut, data yang kami peroleh dari karya-karya atau kompilasi Majelis Mujahidin seperti Risalah Kongres Mujahidin I, KUHP Sesuai Syariat Islam, Sedangkan karya-karya atau kompilasi HTI yang berkaitan dengan penegakan Syariat Islam di Indonesia didapatkan dari berbagai media, lembaga.

a. Metode Interview⁴⁹

Metode ini dimaksudkan adalah metode interview *tidak terstruktur*, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, sedangkan interpretasinya atau pengembangan maknanya bisa dikembangkan oleh pewawancaranya selagi tidak bertentangan dengan data primer yang ada.

b. Metode Observasi

Metode observasi ini dimaksudkan untuk melihat lalu menilai dengan skala bertingkat. Metode ini artinya memonitor berbagai kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan dalam rentang sekali maupun berulang-ulang, kemudian dinilai dengan pendekatan analisis kritis.

⁴⁸ *Ibid*, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...* hlm. 11-13.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Psikologi UGM, 1997), hlm. 192

c. Metode Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang bersifat benda mati sebagai dokumentasi yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, rapat dan sebagainya guna menunjang serta memperkuat pengumpulan data yang ada.⁵⁰

2. Pendekatan Masalah

Secara metodologis tesis ini menggunakan pendekatan sosio-historis yang didalamnya menjelaskan proses gerakan sosial. Pengertian sosio-historis adalah pendekatan yang berusaha memaparkan dan mengkaji aspek sejarah meliputi kelahiran, keadaan intelektual (perjalanan intelektualnya, metode dakwah, jaringan, pendidikan dll) yang bermuara pada keterkaitan dengan masalah penerapan syariat Islam dengan melihat kondisi sosiologisnya. Selain itu pendekatan di atas untuk merekam perjalanan kedua gerakan dan sekaligus untuk mencoba melihat berbagai gesekan sosial yang terjadi pada keduanya baik dalam masa keterpurukannya atau masa kejayaannya, dimana semua itu untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang objektif.

Dari pendekatan diatas, penyusun melihat A. Ezzatti, dalam *Gerakan Islam; Sebuah Analisis*, setidaknya ia mencoba memetakan sebuah gerakan-gerakan yang pernah ada, lalu pengelompokan tersebut penyusun kutip sebagai alat perbandingan untuk bisa mengartikan pengertian gerakan Islam yang menjadi topik bahasan dalam hal ini

⁵⁰ *Ibid*, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ... Ibid*, hlm. 206

adalah HTI dan MMI, bagi penyusun pemahaman pemaknaan gerakan Islam sangatlah penting untuk dipahami seutuhnya karena karya besar seperti *Ilusi Negara Islam*, banyak para pengamat menilai ternyata dalam buku tersebut mengalami kegagalan memaknai gerakan Islam yang seutuhnya.

Setidaknya ada tiga untuk memahami *Gerakan Islam*, *Pertama* gerakan Islam yang berbasis Ideologi seperti Mu'tazilah, Wahabiyah, Asy'ariyah dan sebagainya, *Kedua* berbasis politik seperti Gerakan Konstitusi Iran (1905-1911) dan tahun 70-an pada masa revolusi Iran, *Ketiga* berbasis ekonomi seperti Gerakan Anti Monopoli Tembakau, gerakan Nasionalisasi Minyak Iran (1948-1950).⁵¹

Sedangkan gerakan Islam HTI dan MMI ini penulis memaknai sebagai Gerakan Islam berbasis integrasi Ideologi-Politik yakni gerakan yang didasari oleh paham ideologi yang kuat dan terarah serta bergerak dalam ranah publik untuk bisa memperjuangkan kebijakannya (legal) dalam penegakan syariat Islam sampai *Khilafah Islamiyah* yang sifatnya mendunia.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan lalu data-data tersebut diolah kembali dengan metode yang ada dibawah ini :

⁵¹ Lihat, A. Ezzatti, dalam *Gerakan Islam; Sebuah Analisis*, Surabaya: Pustaka Hidayah, tahun ?, hlm. 12-13.

a. Metode Heuristik

Yaitu sebuah metode untuk mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, lalu kemudian sumber yang ada diseleksi dan dilakukan kritik untuk menemukan sebuah kebenaran.

b. Metode Korelasi

Bertujuan untuk mengetahui atau menemukan ada tidaknya hubungan antara keduanya yakni HTI dan MMI sehingga peneliti mengasumsikan adanya sebuah kontestasi dan apabila ada seberapa erat atau tidak hubungan itu.⁵²

c. Metode Kritik

Yang dimaksudkan kritik disini adalah dilakukannya sebuah dealiktika berkelanjutan untuk menemukan kesepahaman dan saling pengertian terhadap apapun yang ada mengenai penegakan syariat Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini, secara runtun mencakup enam bab, Bab I: Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah merupakan sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tujuannya disesuaikan dengan pokok masalah sedangkan kegunaannya untuk memuat manfaat teoritis dan praktek yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara (intelektual-akademis) memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan

⁵² *Ibid*, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 236-239

belum pernah diteliti secara tuntas. Kerangka teoritik, yaitu gambaran secara global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, yaitu merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan yaitu digunakan sebagai pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti. Bab II: Islam dan Demokrasi, dimana di dalamnya menjelaskan beberapa hal yang saling berkaitan mengenai Islam dan demokrasi itu sendiri, seperti pemaknaan agama (Islam) dalam perspektif agama dan politik, sensor masyarakat muslim terhadap keduanya. Bab III: Reaktualisasi penerapan syariat Islam di Indonesia, dalam bab ini penulis akan menampilkan dua sisi pemaknaan, *Pertama* mencoba mendefinisikan syariat Islam, *Kedua* membicarakan masalah perkembangan dan aktualisasi syariat Islam itu sendiri. Bab IV: Geneologi gerakan Islam model Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia, dalam bab ini aspek kesejarahan mulai lahir, berkembang sampai hari ini coba diungkap sesuai dengan tiga bahasan pokok yakni ideologi, mekanisme serta metode jihad dan apa yang hendak dituju. Bab V: Nalar Gerakan Islam Model Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dalam rangka penerapan syariat Islam, dalam bab ini akan menjelaskan secara komprehensif paradigma pemikiran gerakan HTI dan MMI untuk kerangka penerapan syariat Islam, yang didealektikkan dalam berbagai perdebatan serta sudut pandang yang berbeda. Sedangkan pada bagian keduanya nalar model HTI dan MMI ini

mencoba terus bergerak untuk melawan sistem yang sekiranya sudah mapan, pada bagian terakhir dalam bab ini penulis pun tidak lupa melakukan kritik dengan pendekatan ilmiah dimana diharapkan ditemukan sebuah pemahaman yang universal, yang dapat dipahami oleh semua kalangan sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah sumbangsih keilmuan yang luar biasa nantinya. Bab VI: Penutup, berisi kesimpulan yang menarik benang merah dari isi tesis ini nantinya, dan selain itu ada sebuah saran-saran yang sifatnya ilmiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebebasan setiap manusia untuk berpikir, berpendapat dan berserikat merupakan sebuah kebebasan yang sifatnya hakiki, kebebasan itu lahir dari diri manusia itu sendiri tanpa harus terkontaminasi oleh siapapun yang mendekatinya, sejatinya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna (disbanding dengan makhluk yang lain) merupakan sebuah modal dasar untuk dapat meraih segala yang ingin dikehendaki. Secara normatif Al-Qur'an disetiap kesempatan menyuruh hambanya untuk berpikir, merenung dan bermuhasabah atas segala fenomena yang terjadi, hal senada juga mendapatkan tempat dalam konstitusi negara Indonesia melalui UUD 45 Bab X A pasal 28 E dimana kebebasan berpendapat dan berserikat diperbolehkan sesuai dengan hati nuraninya.

Ruang demokrasi adalah salah satunya ruang yang memberikan sebuah kebebasan berpikir, berpendapat dan juga berserikat, berserikat baginya sebuah keniscayaan yang *naluriah* dibangun oleh manusia, dalam kehidupan manusia pra-sejarah sampai manusia modern hingga hari ini adalah sebuah keberlangsungan yang tiada usai dalam berserikat (berkelompok) untuk dapat mewujudkan keinginannya. Kenyataan ini menunjukkan pada dunia bahwa tujuan akan dapat tercapai dengan mudah jika melalui instrument yang disebut oirganisasi, gerakan, kelompok dan sejenisnya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan salah satu diantara banyak gerakan Islam yang berani mengeluarkan ide, pikiran dalam bentuk gerakan atas nama kebebasan. Dengan gerakan tersebut ide yang dibangun untuk diterapkan adalah Syariat Islam, menurutnya hanya syariat Islamlah yang dapat menyelamatkan dan memberikan sebuah kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat dibanding dengan sistem lainnya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bergerak dalam wilayah politik murni, menyandarkan pendapatnya untuk berpolitik dan berjamaah secara terorganisasi yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai (ideologi) dengan dua tugas yang sudah pasti. *Pertama*, mengajak pada *al-Khayr*, yakni mengajak pada *al-Islâm* yang dimaknai sebagai syariat Islam. *Kedua*, memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat) dengan jalan membentuk khilafah Islamiyah dengan selalu merujuk pada masa awal Islam yakni masa Nabi Muhammad Saw (Negara Madinah), dan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan aktualisasinya melalui cara *Marhalah Tatsqif* (pembinaan kader gerakan), *Marhalah Tafa'ul ma'al Ummah* (berinteraksi dengan umat), *Marhalah Istilamil Hukmi* (tahap pengambilalihan kekuasaan), dalam tahap pengambilalihan ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki lima tahapan :

1. Pembinaan *Tsaqafah Murakkazah* (intensif) melalui *halaqah-halaqah* Hizb untuk para pengikutnya.
2. Pembinaan *Tsaqafah Jama'iyah* bagi ummat.

3. *Ash Shira'ul Fikri* (pergolakan pemikiran) untuk menentang ideologi diluar Islam seperti kapitalis, komunis, dan demokrasi.
4. *Al Kifaahus Siyasi* (perjuangan politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas.
5. Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan ummat, dengan cara membentuk kekuasaan yang bersifat mendunia yakni khilafah Islamiyah untuk melayani dan mengayomi umat dibawah naungan syariat Islam.

Senada dengan HTI yang sedikit memiliki kemiripan adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebagai organisasi atau gerakan Islam dengan dua pimpinan yakni *Ahlu HAli Wal Aqdi* dan Lajnah Tandfiziyah, *Manhaj* atau metode perjuangan MMI adalah *thaifah* (komunitas), dimana gerakan ini menyerukan kebenaran menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw yang shahih. Selanjutnya MMI yang memiliki visi dan misi untuk menegakkan syariat Islam, sebagai gerakan atau organisasi (aliansi) *tansiq* MMI dalam dakwah dan jihadnya dikembangkan dalam 3 formulasi, yakni: kebersamaan dalam misi menegakkan syari'at Islam (*tansiqul fardi*), kebersamaan dalam program menegakkan syari'at Islam (*tansiqul 'amali*), dan kebersamaan dalam satu institusi penegakan Syari'ah Islam (*tansiqun nidhami*). Dan kemudian MMI sebagai gerakan Islam politik, dakwah dan jihadnya yang dibangunnya disandarkan pada dua pemahaman besar, *Pertama*. Mengamalkan syariat Islam secara bersih dan benar, tidak boleh separo-separa sepertihalnya mengadopsi sistem demokrasi. *Kedua* menjalankan syariat Islam secara kaffah dengan jalan peraihan kekuasaan

untuk menerapkan syariat Islam yang ada, Islam tidak akan dapat menjalankan misinya tanpa adanya sebuah instrument kekuasaan secara konstitusional.

Kedua gerakan Islam yakni HTI dan MMI dengan ideologi Islamnya mengusung masa sebagai basis pergerakannya secara masif, oleh karena itu untuk melihat gerakan tersebut, penulis menggunakan pisau analisis dalam penyusunan tesis ini dengan teori “identitas Kolektif”, identitas kolektif yang dibangun oleh HTI maupun MMI memiliki kemiripan dalam oprasionalnya, keduanya secara organisatoris memiliki eksklusivitas dan kebersamaan dalam bentuk gerakan.

Sebagai jalan akhir dari penelitian yang panjang ini, maka penulis akhirnya berkesimpulan bahwa gerakan Islam politik model HTI dan MMI dengan ideologi Islamnya penulis nilai sebagai gerakan “*Un-Islamized for Islamic Movement*” yaitu gerakan Islam yang tidak Islami, kesimpulan ini lahir bukan tanpa sebab dan alasan melainkan sebuah penelaahan yang panjang dengan melihat ideologi yang dibangunnya, metode dakwah dan jihadnya serta bagaimana gerakan Islam politik HTI dan MMI bergerak secara massif dengan jalan mengingkari apa yang mereka jalani yakni sistem demokrasi. Islam adalah agama bukan jalan politik, jika Islam adalah ideologi politik maka sama halnya mempolitisasi agama (Islam), Islam selamanya tak akan pernah menjadi ideologi, sedangkan sebaliknya ideologi politik (apapun bentuknya) tak akan pernah pula menjadi agama.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesaikan tugas akhir ini, maka tersajilah sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis, Tesis yang merupakan hasil dari jenjang studi tingkat dua mengidealkan sebuah penelaahan yang cukup mendalam dan koverhensif, serta menggunakan alat analisis serta metode yang kuat untuk dapat mempertahankan ide-ide yang ditemukan oleh setiap penulisnya, akan tetapi penulis sangat menyadari tulisan yang tersaji ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kedepan setidaknya ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan disini :

1. Kecendrungan sistem demokrasi yang sudah terus berjalan (prosedural) semoga perjalanannya terus berlanjut dan menemukan hakekat demokrasi itu sendiri. Selain itu kajian-kajian mengenai demokrasi setidaknya terus ditingkatkan untuk dapat ikut membangun demokrasi itu sendiri dari sisi akademisi.
2. Syariat Islam yang idealnya menjadi penuntun dan penunjuk jalan bagi semua manusia, dengan kemajuan keilmuan yang ada sudah semestinya dapat dipahami dalam bentuk atau *forsa* yang lain, sehingga Islam atau Syariat Islam tetap dapat mewarnai dan menjadi ruh dalam kehidupan setiap manusia. Hal ini lah setidaknya yang belum penulis ketemukan dalam berbagai sub mata kuliah di SPPI UIN Suka.
3. Jurusan SPPI yang didalamnya terdapat pula kajian *Islamic Studies* sudah selayaknya menyiapkan dan menyediakan dosen-dosen yang menguasai

isu-isu politik kontemporer sehingga jurusan SPPI yang ada tidak ketinggalan oleh jurusan-jurusan yang sejenisnya di berbagai Perguruan Tinggi lainnya.

Akhirnya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang serta pikiran yang jernih, penulis haturkan karya ini “tesis” kekhlayak luas untuk dinilai, dikritisi atau bahkan digugat demi terwujudnya khasanah keilmuan yang dapat menatap masa depan, sangat penulis sadari dimungkinkan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan dan kurang akuratan penulis dalam mengakses data, cara penulisan, mengutip yang ada dalam tulisan ini, oleh karena itu koreksi yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Abdurrahman, Moeslim, *Islam dan Politik Identitas, Kolom*, Edisi 49/02 - 07/Feb/1998
- Abdullah, M. Amin, *Mencari Model Pendidikan Agama Perdamaian Era Multikultural-Multirelijius* (www.uin-suka.info), diakses 09 Oktober 2008.
- , Kuliah Seminari “Pendekatan dalam Pengkajian Islam ” pada PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang disampaikan pada 10 November 2009.
- , Kuliah Seminari dalam matakuliah Pendekatan dalam Pengkajian Islam, PPs. UIN Sunan Kalijaga, disampaikan 30 November 2009.
- Abdallah, Ulil Abshar, *Gagalnya Ideologi Kekerasan dalam Islam*, Editorial, 17/11/2008.
- A. Ezzatti, *Gerakan Islam; Sebuah Analisis*, Surabaya: Pustaka Hidayah, tahun ?)
- Ahmad, Munawar, “Kritik Etika Terhadap Politik” *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. xiv, No. 2 Mei-Agustus 2005.
- Ahmad, Munawar, Kuliah Materi pada Mata Kuliah ”Islam dan Negara Bangsa”, disampaikan pada 22 Mei 2009.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 th Prof. Dr. H. Bustanul Arifin. SH*, Jakarta, gema Insani Press, 1993.
- Akbar, Ahmad Zaini, *Komunikasi dan Demokratisasi* dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* Vol.I/Jul 1998, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Aksin, *Kritik Atas Kritik Interpretasi Al-Qur'an (Telaah Kritis Teori Interpretasi Al-Qur'an Ibn Rushd)*, Disertasi pada PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ali, Tariq, *Benturan antar Fundamentalis; Jihad Melawan Imprealisme Amerika*, terj. Hodari Ariev, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan*, Jakarta: Risalah Gusti tahun 1996.

- , *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Nopember 1996.
- Almadudi, Abul 'A'la, *Cara Hidup Islam*, trj. Ya'kub Muhammad Husen, www.dakwah.info.
- Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Membedah Islam Ekstrim*, Bandung: Mizan, November 2001.
- Albana, Jamal, *Revolusi Sosial Islam; Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, Yogyakarta: Pilar Media, Mei 2005.
- Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia; Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- , shori, Ahmad Yani, *Untuk Negara Islam Indonesia; Perjuangan Darul Islam dan Al-Jama'ah Al-Islamiyah* (Yogyakarta: Siyasat Press, 2008), hlm. 20. Lihat Juga dalam KD. Jackson, *Traditional Authority, Islam and Rebellion; A Study of Indonesia Political behavior*, Berkely, Los Angles an London: University of California Press, 1980.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 2002.
- Arifi, Ahmad, "Membangun Paradigma Fiqih Humanis (Rekonstruksi Metodologis atas Nas-nas Hudud)", dalam *Jurnal Penelitian Agama, Media Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama*, ISSN: 0858-2732), Vol. X., No. 3 September-Desember 2001.
- Attamimy, M, *Habib Husen al-Habsyi dan Peranannya dalam Perkembangan Syi'ah di Bangil*, Ringkasan disertasi yang diajukan pada Program Paskasarjana UIN Sunan Kalijaga, pada Senin, 13 April 2009.
- Astuti, Firtri, Membaca Konsep Wahyu Muhammad Syahrur dalam bukunya Rekonstruksi Konsep Wahyu, (*al-wahy al-mujarrad*) dalam *Populis; Jurnal Pengembangan msyarakat*, ISSN: 1412-4629.
- Assyaukanie, Luthfi, "Seminar tentang Islam Liberal", disampaikan di Perpustakaan, pada 16 Februari 2005.
- Azizy, A. Qodari, *Elektisme Hukum Islam; Komposisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, Februari 2002.
- Azhar, Muhammad, *Wawasan Sosial Politik: Islam Kontekstual*, Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi/UPFE-UMY, Januari 2005.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Moderenisme hingga Post-Moderenisme*, Jakarta, Paramadina, Mei 1996.

- , *Jaringan Ulama; Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, November 1998.
- , *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- , *Munuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Mei 2000.
- , *Konflik Baru Antar Peradaban; Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, Oktober 2002.
- Badri, Muhammad Arifin, <http://muslim.or.id>, diakses 22 Desember 2009. “Dan apa yang kalian perselisihkan tentang sesuatu maka hukumnya kepada Allah.” (QS. Asy-Syura: 10) Ayat-ayat yang mulia ini dan kandungannya, semuanya menunjukkan akan kewajiban mengembalikan hal yang diperselisihkan diantara manusia kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan kepada Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Salam.
- Balack, Antony, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi, 2006.
- Basya, M. Hilaly, “Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia”, Summit of World Muslim Leaders digelar di Jakarta 21-22 Desember 2001 dengan 180 peserta dari 50 Negara.
- Bugi, Mochamad, *Mengenal Syariat Islam*, 25/2/2008
- Bruinessen, Martin van, *Rakyat Kecil, Islam Dan Politik*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, April 1999.
- Buletin al-Islam Edisi 280, “Meluruskan Kembali Makna Jihad”, Kompas, 17/11/2005.
- Dahl, Robert A., *Prihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Darmawan, Andy, *Bedah Buku Multikulturalisme*, di UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Jum’at, 3 April 2009.
- Djam’annuri, “Rekonstruksi Interaksi Islam dan Barat: Perang Salib dan Kebangkitan Ekonomi Eropa”, disampaikan pada 27 Februari 2009.
- Effendi, Djohan, (Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), *Jamaah Islamiyah*, Kompas 2002.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformai Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, Oktober 1998.
- el-Ma’hady, Muhaemin, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (Sebuah Kajian Awal)*, From: <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>, akses, Rabu, 12 November 2008
- Esposito, John L., & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, Maret 1999.

- , *Islam: Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam & Realitas Sosial*, Yogyakarta: Inisiasi Press, Agustus 2004.
- Ensiklopedia Tematik Dunia Islam Asia Tenggara, Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve, 2005.
- Fadl, Abou El, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih Oteriter ke Fiqih Otoritatif*, tejm. R Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Faisal, Ahmad, *Rekonstruksi Syariat Islam: Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Syariat Islam oleh KPPSI Di Sulawesi Selatan*, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Faiz, Fahrudin, *Fenomena Penyesatan Antar Agama; Sebuah Catatan kritis*, Diskusi Ilmiah Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat 22 Mei 2009.
- Fanani, Ahmad Fuada, *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- , *Hijrah untuk Transformasi Kepemimpinan Bnagsa*, Suara Muhammadiyah meneguhkan dan mencerahkan, No. 03/TH. KE-93/1-15 Februari 2008.
- , dalam wawancara dengan KH Asep Ahmad Mausul Affandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, 23 September 2005.
- Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2003.
- Feillard, Andree, *NU vis-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 5, th 2003.
- Ghafur, Waryono Abdul, *Millah Ibrahim dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husein Ath-Thabathaba'I*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ghazali, Abd Moqsith, *Hermenuitika Pembebasan; menghidupkan Al-Quran dari Kematian*, Ulumuna, Vol. VIII. Edisi. 13. No. 1 Januari-Juni 2004.
- Ghofar, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia; Studi atas Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: Walisongo Press, Oktober 2002.
- Gunawan, *Runtuhnya Konsolidasi Demokrasi*, Yogyakarta: Pusat Studi Masyarakat, Agustus 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Psikologi UGM, 1997.
- Hafifudin, Didin, makalah dalam buku, *Menggugat Gerakan Pembaharuan Islam; Debat Besar Pembaharuan Besar*, Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, Junni 1995.

- Hanafi, Hasan, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi dan Hermeneutika*, trjm. Jajat HF, Yogyakarta: Prisma Pustaka Utama, April 2003.
- Haris, Syamsudin, "Genealogi Gagasan Demokrasi di Indonesia", *Analisis CSIS-Perjuangan Demokrasi dan Otonomi*, Tahun XXIV, No. 2 Maret-April 1995.
- Hartono, "Otoritas dan Kebebasan" catatan kuliah pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam, diampu oleh Prof. Dr. Akh. Minhaji. Ph.D. PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- , catatan kuliah pada mata kuliah "Pendekatan dalam Pengkajian Islam", dengan dosen pengampu Prof. Dr. H. Amin Abdullah, PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- , *Catatan Awal di Yogyakarta bersama Gerakan Islamiyah Indonesia*. September 2004.
- , "Kuliah Seminar" Islam dan Negara Bangsa, Munawar Ahmad, pada 4 Maret 2009.
- , *Kontektualisasi Demokrasi di Indonesia dalam Perspekti Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif*, tahun 2008.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, September 2005.
- Hasan, Nurhaidi, *Islam dan Negara; Trnsformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad; Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2009.
- Hermawan, Eman, *Politik Membela Yang Benar, Teori, Kritik & Nalar*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Held, David, *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hikam, M. As., Mulyana W. Kusuma *et.al Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Hidayat, Komaruddin *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina, Oktober 1996.
- Huwaydi, Fahmi, *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, September 1996.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hutabarat, Ramly, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005.

- Ilyas, Hamim “Paradigma dan Karakteristik Islam Sebagai Rahmat Untuk Semua” makalah dalam buku, *Belajar dari Kisah Kearifan Sahabat: Ikhtiar Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pilar Media, Maret 2007.¹
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Penerbit Mizan, Maret 1999.
- Ikhsan, Muhammad, (Makalah) Hukum Islam di Indonesia; Dulu dan Sekarang, www.google.co.id.
- Ikhsanudin, M., “Mengembangkan Metodologi Penemuan Hukum Islam “Syariah Cum Reality”; perspektif Historis dan Metodologis, dalam *An-Nur Jurnal Studi Islam*, ISSN: 1829-8753 Vol. II, No.5, September 2006.
- Ign. Gatut Saksono, *Dialog Wacana Syariat Islam dan Sumbangan Pikiran Orang Kristiani*, Resensi Buku, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008.
- Imawan, Riswanda *Membedah Politik Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ittihadiyah, Himayatul, *Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Histrografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI)*, Jurnal Penelitian Agama; Media Komunikasi, penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama, ISSN: 0854-2732. Vol. XVII, No. 3 September-Desember 2008.
- Ishomuddin, *Diskursus Politik dan Pengembangan; Melacak Arkeologi dan Kontroversi pemikiran Politik dalam Islam*, Malang: UMM Press, 2001.
- Jabari, Fead, *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Juni 2002.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Bahayanya Islam Liberal*, Resensi, 28 November 2001 M, diakses melalui www.google.co.id, pada 9 Agustus 2009.
- Jurnal “Studi Ilmu-ilmu al-Quran-Hadis”, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ISSN: 1411-6855. Vol.6.No.1 Januari 2007.
- Junaidi, Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.
- Karim, M. Abdul, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Islam Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Sumbangsih Press, November 2005.
- , menanggapi pendapat Azumardi Azra mengenai “Kapan, Siapa dan Darimana” Karima adalah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga dan Moderator kajian rutin malam sabtu, disampaikan pada 9 Januari 2010.
- Kartanegara, Mulyadi *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, September 2003.
- Karseno, Arief Ramelan, *Dari Jogja Untuk Indonesia: Sebuah Wacana Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Inspect, Januari 2004.

- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, trj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, Agustus 2003.
- Kazim, Musa (CIMA), *Menuju Indonesia Baru: Mengagas Refomasi Total*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Ketchum, Richard M. (Ed), *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Niagara, 2004.
- Khaldun, Ibn, *Muqadimah*, trjm Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan.
- Kurniawan, Muh, "Jihad vs Terorisme", ww. muslimdaily.net, diakses 10 Januari 2010.
- Kusnadi1, Didi, "Hukum Islam Di Indonesia; Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum Dan Produk Hukum", <http://google.co.id.makalahhukumislam>. akses 18 Nov 2009.
- Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa; Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, September 2005.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada Tanggal 23 September - 3 Oktober 2006.
- Liddle, R. William, *Revolusi Demokratisasi dari Luar*, Jakarta: Penerbit Nalar, 2005.
- Loeibis, A R., *Belantara Kebangsaan*, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Lukens-Bull, Ronal Alan, *Jihad Ala Pesantren dimata Antropolog Amerika*, Yogyakarta: Gama Media, Juli 2004.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Februari 1985.
- , "Masalah Dunia Islam dan Politik Global, Politik dengan Parameter Syar'i", Disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah, 28 April 2007, di Hotel Garuda Yogyakarta.
- , "wawancara di kampus UGM" Jum'at 14 Maret 2008.
- , Tulisannya dalam buku *Islam di Indonesia; Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , Dialog Aktual TVRI-Jogja, Bersama Ahmad Safi'i Ma'arif, dengan tema "Etika Politik dalam Demokrasi" pada 11 Februari 2008.
- Machasin, dalam Ujian Promosi disertasi pada PPs. UIN Sunan Kalijaga, disampaikan pada 12 Januari 2009.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- , *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, Maret 1999.
- , *Masyarakat Relegius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, April 2000.
- , *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

- Mangkubumi, KGPH., *Kerangka & Konsep Politik Indonesia*, Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1989.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Marsen Ng, *Kejayaan Aceh dan Politisasi Syariat Islsm*, *Aceh Institute*, 19 September 2009.
- Marluwi, *Hukum Islam di Indonesia Mungkinkah ?*, JUSTITI Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 3/No. 1/Jan-Juni 2005, ISSN 1693-5926, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.
- Martin, Richard C., *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, trjm. Zakiyuddin Bhaidawy, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Mohtar Mas' oed, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan Indonesia: Sebelum dan Sesudahnya Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 1999.
- Mudzhar, Atho', *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina.
- Mughaits, Abdul, "Kajian Ushul Fiqih di Pesantren Tradisional; Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri", dalam *Taswirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, ISSN: 1410-9166, Edisi No. 18 tahun 2004.
- Milani, Mohsen M., dengan tulisannya yang berjudul "Partisipasi Politik di Iran Pascarevolusi 1979", *Langkah Barat Menghadang Islam*, Yogyakarta: Jendela, Februari 2004.
- Muhsin Z, Mumuh, "teori masuknya Islam ke nusantara" makalah disampaikan dalam diskusi sejarah Islam Indonesia diselenggarakan mahasiswa jurusan sejarah fakultas sastra universitas padjadjaran jatinangor, 13 maret 2007.
- Muhammad, Mahatir, *Menjadi Muslim Fundamentalisme*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007 .
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasinya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Agustus 2000.
- Mujani, Saiful, dkk, *Benturan Peradaban; Sikan dan Prilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika Serikat*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM, Oktober 2005.
- , *Muslim Demokrasi: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos politik Santri; Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: SIPRESS, 1999.
- , *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqih Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Roykhan, 2005.
- Munip, Abdul, *Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia: Studi Tentang Penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia Priode 1950-*

- 2004, Disertasi pada PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Maliki, Zainuddin, *Politikus Busuk fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Munir, Ahmad, "Agama dan Etos Perubahan", dalam *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, ISSN: 1693-1149, Vol.5 No. Juni-Desember 2007.
- Mr. Kurnia, dkk, *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif*, Penulis Penerbit Pustaka Al-Azhar, 2005.
- Mr Kurnia, "Sejarah Indonesia Adalah Sejarah Perjuangan Syariah Islam", Disampaikan pada Seminar Sejarah Islam, "Pengayaan Materi Pelajaran Sejarah Islam di Indonesia", DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Bogor, Gedung Serba Guna1 Pemda Kab. Bogor, Cibinong 18 September 2007.
- Najib, MH. Ainun, Disampaikan pada "Mai'yah bersama Kiyai Kanjeng" Kasihan, Kasongan-Bantul, pada 17 Januari 2010.
- Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- Nugroho, Taufiq, *Pasang Surut Islam dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: PADMA, Juli 2003.
- , *Fiqih Kiri; Revitalisasi ushul Fiqh untuk Revolusi Sosial*, <http://uin-suka.co.id.galiliokusuka.akses> 2 Agustus 2008.
- Nashir, Haedar dan Pramono U Tanthowi, "Gerakan Formalisasi Syariat Tak Ada Matinya"; *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, www.islamlib.co.id. Akses 28 November 2009.
- Nugroho, Alois A, "Reformasi Total Sebagai Reformasi Kultural", *Kompas*, senin 8 Juni 1998.
- Nugroho, Taufiq, *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: PADMA, 2003.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit, Agustus 1994.
- Panggabean, Taufik Adnan Amal *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2004.
- Purwoko, Dwi, *Islam Konstitusional vs Islam Radikal*, Jawa Barat: PT. Permata Artistika Kreasi, 2002.
- Putro, Suadi, *Mohamed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, Januari 1998.
- Qodari, Zuly, Makalah dengan judul *Etika Islam: Suatu Pengantar*, yang dimuat dalam buku, *Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama*, Yogyakarta: Interfidei, November 2003.

- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Budaya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Rahman, Fazlur, Dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta; PT Tiara Wacana, Mei 2002.
- Rahardjo, M. Dawam, "Pancasila, Mitos dan Rialitas", *Kompas*, Minggu 1 Juni 2007.
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, disebutkan dalam Bandung: Mizan, Mei 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1991.
- Rakhmad, Jalaluddin, *Islam Alternatif; Ceramah di Kampus*, Bandung, Mizan, November 1998.
- Rais, M. Amien, dalam tulisannya yang berjudul *Tidak ada Negara Islam*, yang ada dalam buku *Tidak ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Majid-Mohamad Roem*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- , *Islam di Indonesia; Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, April 1996.
- , *Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1999.
- , *Demi Kepentingan Bangsa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Ramadan, Tariq, *Menjadi Modern Bersama Islam; Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, Juli 2003.
- Report, Annual, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal", Edisi 2001-2002.
- Ridwan, Nur Khalik, *Santri Baru; Pemetaan Wacana Ideologi dan Kritik*, Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004.
- Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi; Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, lihat pula dalam buku *Islam Aqidah wa Syariah* karangan Mahmud Syaltut, Jakarta: CV. Mustika Bahmid, Juni 2002.
- Rosyada, Dede dkk, *Demokrasi & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh, 2003.
- Rozak, Abdul dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam: Untuk IAIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, Januari 2003.
- Sadikin, Ali, *Petisi 50*, *Tempo Iinteraktif* Rabu, 29 Desember 2004.
- Shadily, John M Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Sagiv, David, *Islam Otensitas Liberalisme*, Yogyakarta: LKis. 2000.
- Santos, Arysio, *Atlantis The Continent Finally Found (The Devenitive Localization of Plato's Lost Civilization)*, *Indonesia Ternyata Tempat Lahir Peradaban Dunia*, trjm. Hikmah Ubaidillah, Jakarta: Ufuk Press, Januari 2010.

- Shihab, Alwi, *Islam Inkusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, Maret 1999.
- Shabab, Alwi, "Media Berbahasa Arab" *Harian Republika* edisi Minggu, 26 Februari 2006.
- Shalih, Sa'duddin As-Sayyid, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, terj. Muhammad Thaib, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 1996.
- Shofan, Moh., *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, Yogyakarta: IRCioD, April 2006.
- Sinar Harapan* (Harian Umum Sore, Edisi Rabu 25 Februari 2004).
- Sirajudin, *Legeslasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2008.
- Soeharto, Brigjen, *Keterbukaan dalam Demokrasi Pancasila*, *KAJIAN* Jurnal Ilmiah, ISSN: 0215-2673 / No. 00 / November 1995.
- Subangun, Emanuel, *Politik Anti Kekerasan Pasca Pemilu 99*, Yogyakarta: Yayasan Alocita, 1999.
- Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, Februari, 2006.
- Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Cermin, November 1999.
- Suseno, Frans Magnis, "Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Suprpto, *Memerdekakan Indonesia Kembali Perjalanan dari Soekarno ke Megawati*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2004.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, Oktober 1998.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Syed Naquib Al-Attas dalam *Wajah-Wajah Islam*, trj. A.E. Priyono, Bandung: Mizan, September 1992.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, trjm. Saifuddin Zuhri, Yogyakarta: LKiS, Juli 2003.
- Syamsu As, Muhammad, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, Januari 1999.
- Syamsuddin, Sahiron, *Integrasi Hermeneutika hans Georg Gadamer kedalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Al-Quran pada Masa Kontemporer*, Dipresentasikan pada Annual Conference Kajian

Islam yang dilaksanakan oleh DitPertais DEPAG RI pada tanggal 26-30 November 2006 di Bandung.

- Syaifullah, Khalid, "Rekam Jejak Gerakan Mahasiswa Islam Pasca Reformasi" Disampaikan dalam Milad IMM di Aula Kampus UMMY Solok, 18 Maret 2008. Diakses melalui www.google.co.id, pada 27 Desember 2009.
- Tahrir, Hizbut berdiri tahun 1953. Dari bagian barat, ruangan Masjidil Aqsa, 56 tahun silam, (Republika, 13/04/09)
- Tafsir, Ahmad, Makalah "*Posisi Nurcholis Madjid dalam Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia*", dalam buku *Prof. Dr. Nurcholis Madjid; Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Agustus 2003.
- Tahqiq, Nanang (ed), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, April 2002.
- Tamtowi, M, *Dinamika Hukum Islam; Studi Konsep Umurun Mutasyabihat*, abstraksi disertasi yang diajukan kepada Program Paskasarjana strata tiga dalam bidang Ilmu Agama Islam pada UIN Sunan Kalijaga, pada Jumat 5 Januari 2009, di gedung serba guna UIN.
- Thaontowi, Jawahirm, *Islam, Politik & Hukum; Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Uhlir, Anders, *Indonesia and the Third of Democratization The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing world*, trjm, Rofiq Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Oposisi Berserak Arus deras Demokratisasi Gelombang ketiga di Indonesi*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Pers, 2000.
- Wahid, Marzuki, "Pro & Kontra FPI : Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia" Karakter Islam Indonesia, Workshop Islam dan Pluralisme V di Kantor The WAHID Institute Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Matraman Jakarta, Jum'at (25/01/2008).
- Wahyuni, Sri dan Udio asuki, *Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pasca Orde Baru* (Studi terhadap pemikiran Politik Partai-partai Islam), SOSIO-RELEGIA; Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol.3, No. 3, Mei 2004.
- Wahid, Abdurahman "Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama", *Jawapos*, Minggu 23 Desember 2007.
- , *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Bhenika Tunggal Ika, The Wahid Institut dan Ma'arif Institut, April 2009.
- , *Membangun Demokrasi*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

- , “satu jam berdama Gus Dur” yang disiarkan langsung oleh tvOne. 10 September 2009.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Press, September 2007.
- , dalam “Kuliah seminari”, pada matakuliah politik Islam Kawasan yang disampaikan pada 14 Desember 2009, di ruang Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta.
- , dalam ”Seminari Kelas” menyatakan umat sekarang hendaknya memiliki atau mendalami keilmuan teknologi yang memadahi sehingga Islam tidak ketinggalan oleh peradaban dunia yang semakin maju ini, selain itu dibutuhkan seorang *Oreintalis-Plus* yaitu sosok muslim yang kaya dengan ilmu pengetahuan akan tetapi didadanya masih ada Iman dan Islam, disampaikan pada 12 November 2009.
- , *The Slogan “Back to the Qur’an and the Sunna” As the Ideal Solution to the Decline of Islam in the Modern Age (1774-1974)*, Yogyakarta, Nawasera, 2007.
- , Kuliah Seminari “Politik Islam Kawasan” PPs. UIN Sunan Kalijaga, disampaikan 28 Januari 2010.
- Watt, W. Montgomery, *Studi Islam Klasik; Wacana Kritik Sejarah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, April 1999.
- Wiktorowicz, Quintan *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach*, Indiana University Press, 2004.
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, Mei 2004.
- Yusdani, Amir Mu’alim, *Ijtihad dan Legeslasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, Januari 2005.
- Yusanto, Ismail, menurut Ismail Yusanto, Wawancara di masjid Deponegoro/Balaikota Yogyakarta dalam rangka “Refleksi Akhir Tahun”, Sabtu 9 Januari 2010.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zuhriyah, Erfaniyah, “Ijtihad Hakim Agama dalam Konteks Undang-Undang”, dalam *Jabal Hikmah; Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam*, ISSN: 1978-9653, Vol.1, No. 2. Juli 2008.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Imam Syafi’i: Moderatisme, Eklektisme, Arabisme*, trjm. Khoiron N, Yogyakarta: LKiS, Juni 1997.
- Zayd, Nashr Hamid Abu, dalam *Tekstualitas Al-Qur’an; Kritik Terhadap Ulumul Qur’an*, Yogyakarta: LKiS, Mei 2005.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Pokok-Pokok Pikiran Hizbut Tahrir*, alih bahasa: Abu Afif, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 1993.
- , (Hatimmiyah Shira' al-Hadharat) *Benturan Peradaban; Sebuah Keniscayaan*, trj. Abu Faiz dkk, Jakarta: HTI-Press, Maret 2005.
- , (*Mafahim Siyasiyah Li Hizbut tahrir*) *Konsep Politik Hizbut Tahrir*, Edisi Mu'tamadah, terj. M Shidiq Al-Jawi, Jakarta: HTI-Press, Februari 2009.
- , (Ad-Daulah Al-Islaiyah), *Daulah Islamiyah*, terj. Umar Faruq, Jakarta: HTI-Press, Februari 2009.
- , *Peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta: HTI-Press, Maret 2007.
- , *Konsep Politik Hizbut Tahrir, Mabda* atau ideologi bagi HT sangatlah penting untuk dipegang dan disebarakan keseluruhan penjuru dunia, Jakarta: HTI-Press, Februari, 2009.
- , *Asyahsyiah Islamiyah*, Jakarta: HTI-Press, Januari 2007.
- Al-Wa'ie; Media Politik dan Dakwah Membangun Kesadaran Umat "Negara kapitalis Negara Pemalak", No. 111 Tahun X, 1-30 November 2009.
- Al-Wa'ie; Media Politik dan Dakwah Membangun Kesadaran Umat "Menyikapi Kemungkaran (Dari Aliran Sesat hingga Neoliberalisme)", No. 114 Tahun X, 1-28 Februari 2010.
- Hanif, Abu, Wawancara di Masjid UGM dengan Sekjen HTI-Cab. Yogyakarta, 14 Desember 2009.
- Hartono, Wawancara dengan pengurus sekretariat HTI Cab-Yogyakarta, yang penulis lakukan pada 10 Januari 2010.
- , Gerakan Khilafah tipe *Ad Daulah*: Hizb Tahrir dan Khilafat Commitee, Kuliah seminari yang disampaikan oleh Munawar Ahmad, pada 4 Mei 2009.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Admistrasi*, Jakarta: HTI-Press, Juni 2006.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

- Awwas, Irfan S, "Kritik Atas Penolakan Ideologi Transnasional" Pada tahun 50-an, sidang tarjih Muhammadiyah, menelorkan sebuah keputusan tentang makna agama. Yaitu, tatanan kehidupan dalam segala aspeknya, termasuk politik dan kenegaraan. *Republika*, 9 Mei 2007.
- , *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguk Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*, Jogjakarta: Uswah, 2008.

- , Wawancara eksklusif di masjid markaz Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), pada 18 Desember 2009.
- , Wawancara dengan tema “Penerapan Syariat Islam” yang dilakukan pada hari Minggu, 13 Desember 2009, di Markaz Majelis Mujahidin Indonesia, Jl. Karanglo Imogiri, Bantul Yogyakarta.
- , *Dakwah dan Jihad Abubakar Ba’asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, April 2003.
- , “Implementasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Politik”, Makalah ini disampaikan dalam Diskusi Ahli tentang *Syari’ah Islam Dalam Perspektif Politik* di Indonesia. Diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, di Hotel Quality, Surakarta. Sabtu 29 Juli 2006.
- Ba’asyir, Abu Bakar, *Dialog Keagamaan Dalam Book Fair*, dilaksanakan di halaman Gedung Pameran Wanitatama, 4 Mei 2008.
- Ba’asyir, Abu Bakar, Hukum demokrasi dan golput dalam pandangan Islam, Kamis, 26 Maret 2009, <http://arrahma.co.id>. diakses 12 Desember 2009.
- Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III Majelis Mujahidin dengan tema “Indonesia Bersyari’ah Solusi Tepat Salah Urus Negara” yang dilaksanakan pada 9-10 Agustus 2008 di Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta. Dan secara substansi masih memiliki kesamaan dengan putusan Kongres Mujahidin I tahun 2000.
- Mujahidin, Risalah; Berterus Terang dengan Kebenaran “Konfrensi Khilafah Menyuburkan Khilafiyah”, Edisi 11 Th 1 Sya’ban 1428 H / Agustus 2007 M.
- , Berterus Terang dengan Kebenaran, ”Benarkah HTI Sesat”, Edisi 12 Th I Ramadhan 1428 H / September 2007 M.
- , Berterus Terang dengan Kebenaran “Mahasiswa Setuju Syari’ah Tak Minati Pancasila”, Edisi 11 Th Rabiul Awwal 1429 H / Maret-April 2008 M.
- Mujahidin, Majelis, Usulan Amandemen UUD’45 Disesuaikan dengan Syariat Islam, Dikeluarkan Oleh Markaz Pusat Majelis Mujahidin, Jl. Veteran No. 17 Jogjakarta. Telp. (0274) 373458, email: m.mujahidin@telkom.net.

Surat Kabar, Majalah dan Website Internet

- Aceh Institut, Syariat Islam Versus Falsafah Negara Pancasila, 01 October 2009/<http://google.co.id>.
- Aceh Institute, Syariat Islam Versus Falsafah Negara Pancasila, Artikel & Opini, diakses melalui www.google.co.id. Pada tanggal 30 November 2009.
- Ali, Muhammad, *Teologi Pluralisme Multikultural*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Al-Jawi, M. Shiddiq, "Ulama Wajib Mengoreksi Penguasa", www.hizb-tahrir.com. Diakses 2 Januari 2010.
- Al-Maududi, Abul A'la, Dasar-dasar Islam, www.dakwah.info
- Al Afghani, Ally Muhammad Abduh, "Jangan Menduakan Al-Qur'an; Pilih Islam atau Pancasila?", <http://google.co.id/> islam dan pancasila, diakses 11 Januari 2010.
- Baso, Ahmad, NU Studies-Ideologi transnasional, www.buntetpesantren.org, diakses 5 Januari 2010.
- Basyari, Nurcholis MA, "Tokoh Agama Sumbar Tolak Pluralisme", *Media Indonesia*, Sabtu, 20 Agustus 2005.
- Fachruddin, "Esai: Hukum Adat dalam Hukum Islam" *Lampung Post*, Jumat, 3 November 2006, dalam www.google.co.id. Akses 20 November 2009.
- Fauzi, Ihsan Ali, Pada 29 Juli 2004 Jaringan Islam Liberal (JIL) mengadakan diskusi dengan tema "gerakan fundamentalisme dan radikalisme di negara-negara Islam" dengan menghadirkan pembicara mahasiswa doktoral Ohio University dan Khursid Ahmed seorang intelektual muslim-liberal asal Pakistan. *Sinar Harapan*, Selasa, 10 Agustus 2004.
- Febriansyah, Reza Fikri, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia", Dikirim/ditulis pada 23 April 2007/www.google.co.id, diakses pada 22 November 2009.
- Fenomena Agama dan Dinamikanya" www.google.co.id. Akses 12 November 2009.
- Fromm, Teori Identitas Sosial, <http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/> - _ftn5, diakses 11 November 2009.
- Geovani, Jeffrie, "Merasionalkan kembali Pancasila-*common platform*, *Jawapos* Jumat 2 Juni 2006.
- Hanif, Hasrul, *Multikulturalisme di Indonesia*, *Suluh*; Majalah Antar Iman, ISSN: 1693-3192/2007.
- Hidayat, Komarudin, menyebutkan adanya lima tipologi sikap keberagamaan, yakni "eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme" Adeng Muchtar Ghazali, 2008, *Tipologi Sikap Keberagamaan*, tersedia pada, http://amgy59.blogspot.com/2008_03_01_archive.html, diakses 23 September 2008.
- <http://alquran-digital.co.id>
- [http://google.co.id/komentarpolitik/Indra J Piliang, Partai Islam Ideologis; Penting!](http://google.co.id/komentarpolitik/Indra%20Piliang,%20Partai%20Islam%20Ideologis;%20Penting!), 25 Agustus 2008, diakses pada tanggal 23 November 2009.
- <http://google.co.id/politikislam>, diakses pada 30 November 2009.
- <http://google.co.id/hukumpositif> dan hukum islam di Indonesia, akses 20 Desember 2009.
- [http://google.co.id/Sistem Wilayatul Faqih dan Kepresidenan](http://google.co.id/Sistem%20Wilayatul%20Faqih%20dan%20Kepresidenan), tanggal 17/06/09.

- <http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/> - _ftn1, akses 17 Nov 2009.
- [http://google.co.id/islamdandemokrasi/membincang kembali relasi islam dan demokrasi](http://google.co.id/islamdandemokrasi/membincang_kembali_relasi_islam_dan_demokrasi), diakses pada 10 desember 2009.
- <http://www.google.co.id/mmi/islamika>. Akses Minggu, 26 April 2009.
- [http://google.co.id/facebookgroup/sejuta dukungan tegaknya khilafah](http://google.co.id/facebookgroup/sejuta_dukungan_tegaknya_khilafah), diakses pada 12 Desember 2009.
- [http://google.co.id/ syariat Islam](http://google.co.id/syariat_Islam).
- [http://google.co.id.”uin disinyalir menyebarkan paham sesat”hartono abdul jaiz](http://google.co.id/”uin_disinyalir_menyebarkan_paham_sesat”hartono_abdul_jaiz), diakses 12 Desember 2009.
- [http://google.co.id, Dialektika Antara Islam Dan Nasionalisme Pancasila](http://google.co.id/Dialektika_Antara_Islam_Dan_Nasionalisme_Pancasila), diakses 11 Januari 2010.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alislam&id=280>
- <http://www.sabili.com/telus>.
- [http://www.suaramerdeka.com/Gerakan Islam Transnasional](http://www.suaramerdeka.com/Gerakan_Islam_Transnasional), diakses pada 20 Desember 2009.
- <http://google.co.id.pergerakanpolitikislampascareformasi98>. diakses 23 Desember 2009.
- <http://qanunasasi.google.co.id.dalamnii>. akses 23 mei 2009.
- <http://google.co.id/7programperjuangannegaraislamindonesia>. akses 23 Mei 2009.
- <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0711/26/opi01.html>, diakses 15 Januari 2010.
- [http://google.co.id.pergerakanpolitikislampascareformasi98.Mashadi,”Ideologi Transnasional”](http://google.co.id.pergerakanpolitikislampascareformasi98.Mashadi,”Ideologi_Transnasional”), Sumber : Republika; Jumat, 25 Mei 2007.
- <http://www.harianbangsa.com/main.php?aksi=berita&categories=Laporan%20>.
- <http://google.co.id/teorigerakansosial>, diakses pada hari selasa 10 Nov 2009, pukul 10.00.
- HTI-Press, Apa arti Syariat Islam? (Ibn al-Manzhur, *Lisân al-‘Arab*, juz I hal.175, Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihah*, hal. 294, Al-Jurjani, *at-Ta’rifât*, hal. 167, Imam al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubi*, juz XVI hal. 163, Ibn al-Manzhur, *Lisân al-‘Arab*, juz XI, hal. 631) www.hti.co.id
- Islamisasi, www.google.co.id/. Kidung penziarah.com, Diakses pada tanggal 20 N0vember 2009.
- Karni, Asrori S., "Islam liberal" di Tanah Air terbantu oleh peredaran buku *Islamic Liberalism* (Chicago, 1988) karya Leonard Binder dan *Liberal Islam: A Source Book* (Oxford, 1998) hasil editan Charles Kurzman. *GATRA*, Edisi 2 Beredar Senin 17 November 2003.
- Maarif, Ahmad Syafii, Sebagai bahan perbandingan dalam “Peranan Syafii Maarif dalam membangun Pluralisme di Indonesia, <http://www.maarifinstitute.org> Menggunakan Joomla! Generated: 14 September, 2009, 10:35.

- , “Demokrasi dan Posisi Umat”, *Republika*, Selasa 13 Juli 1999.
- , “Pancasila Sudah Final sebagai Ideologi”, *Republika*, Selasa 30 Mei 2006.
- Mahendra, Yusril Ihza, “Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia” makalah pada seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses melewati [www.legalitas.org/hukum islam](http://www.legalitas.org/hukum_islam). pada tanggal 22 November 2009.
- Mujahidin, Majelis, Indonesia adalah lembaga yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. <http://google.co.id/majelismujahidin/com>.
- Murtadho, M., *Agama Sipil : Sebuah Jalan Tengah?*, (Antara Negara Sekuler dengan Negara Agama), tersedia pada <http://murtadhoui.wordpress.com/perihal>, diakses 22 September 2008.
- Muzadi, Hasyim, “Dalam Pidato Politiknya NU Masih di Tunggangi Kepentingan Partai Politik”, (Harlah NU ke 82 di Setadion Gelora Bung Karno, *Jawapos* 3 Februari 2008).
- Muzyadi, Hasyim, “Bila Syariah Harfiah, Negara Retak” *Gatra*, Laporan Utama, Rabu, 19 April 2009.
- Madjid, Nurcholish, “Homogenisasi Ingkari Jati Diri Indonesia”, *Kompas*, Kamis, 23 Maret 2000.
- Nashir, Haedar, dan Pramono U Tanthowi, ”Gerakan Formalisasi Syariat Tak Ada Matinya” *IslamLib.com*, Senin, 16 Juli 2007. Akses pada 18 November 2009.
- Rahbar*, (*basij*). www.google.co.id.
- Rahardjo, M Dawan, “Pancasila, Mitos dan Rialitas”, (*Kompas*, Minggu 1 Juni 2007).
- Rais, M. Amien, “Tentang Syariat, Islam Fundamentalis dan Liberal”. Diakses melalui www.google.co.id, pada 25 Desember 2009.
- REDAKSI, Pengertian Syariah Apa Pengertian Syariat Islam itu? *HTI-Press*. 29 November 2008.
- Rislah Mujahidin* Berterus Terang dengan Kebenaran, MMI, Istiqamah Mengemban Risalah Dakwah “Konfrensi Khilafah Menyuburkan Khilafiyah”, Edisi 11 Th Sya’ban 1428 H/Agustus 2007 M.
- Riswanto, Arif Munandar “Dari Islam Modernis Menuju Islam Moderat”.www.google.co.id, diakses pada 15 Januari 2010.
- Rohi, Pter A., “Jangan Pelihara Manorkhisme Partai”, *Jawa Pos* (16 Juli 2004).

- Sabili. AM Hendopriyono menyatakan, “Setelah tesis Liberalisme-Kapitalisme gagal mensejahterakan dunia, Kekhilafahan seharusnya muncul sebagai penggantinya, Sabili, no 19 TH XVI, 9 April 2009.
- Sabili, Edisi 25 Th XIV, 13 Jumadil Akhir 1428. 28 Juni 2007.
- Sanit, Arbi dan Ray Rangkuti, “Menyoroti Pemilu di Amerika Serikat” (Dialog Aktual di TVRI, Jumat 08 Februari 2008, pukul 23.00-23.30).
- Tvone, Orde Baru: Pelanggaran HAM, siaran langsung 21 Mei 2009 mengenang 10 reformasi 98.
- Tabloid Jum’at, 23 Januari 2004.
- Vivanews, tanggal 3 Desember 2009.
- Wahid, Abdurrahman, dalam <http://www.islamlib.com> 10/04/2006.
- www.khilafah1924.org
- www.vivanews.com/11/12/09.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, ”Meninjau kembali Gerakan Relegio-Politik Islam”, Pada tanggal 15-17 Oktober yang lalu *Japan International Institute of International Affairs* (JIIA) mengadakan simposium tentang Islam in Asia, *Revisiting the Socio-Political Dimension of Islam*, www.hidayatullah.com.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hartono. S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Mei 1985
Alamat Rumah : Jl. Mujair Sp. I Des. Wanasari Kec. Muara
Wahau KUTIM-KALTIM
Nama Ayah : Bpk. Garimo
Nama Ibu : Ibu. Suminah
Nama Istri : Yufi Musriyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 018 Kalimantan Timur tahun lulus 1998
 - b. MTS PPKP Ribatul Khail Timbau Tenggara tahun lulus 2002
 - c. MA PP-Tebu Ireng Jombang Jawa Timur tahun lulus 2004
 - d. S. I UIN Sunan Kalijaga tahun lulus 2008
 - e. S. 2 PPs UIN Sunan Kalijaga tahun lulus 2010.

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Remaja Masjid
2. Organisasi Intra Sekolah (OSIS)
3. Organisasi Daerah Hiswita PP-Tebuireng
4. Organisasi Daerah HIPMA-KT Cab. Yogyakarta
5. HMI
6. GMNI Cab. Yogyakarta

Yogyakarta, 1 Maret 2009

Hartono. S.H.I
NIM. 08 234 465